

SKRIPSI

***SMART GOVERNANCE* DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF KOTA
CERDAS DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS APLIKASI BACCE)**



Disusun dan diusulkan Oleh:

Muh. Fachrul Nur Faisal

105641109920

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**SMART GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF KOTA
CERDAS DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS APLIKASI BACCE)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh

Muh. Fachrul Nur Faisal

Nomor Stambuk : 105641109920

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Smart Governance* Dalam Pembangunan Inklusif
Kota Cerdas Di Kota Makassar (Studi Kasus
Aplikasi Bacce)
Nama Mahasiswa : Muh. Fachrul Nur Faisal
Nomor Induk Mahasiswa : 105641109920
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Mengetahui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


Hamrun, S.IP., M.Si

Menyetujui:

Dekan Fisip Unismuh Makassar

Ketua Program studi


Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos., M.Si


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM.730 727

NBM.1207 163

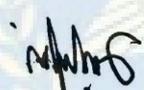
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 2387/FSP/A.5-VI/IX/1445/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, Tanggal 16 Agustus 2024

Mengetahui

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

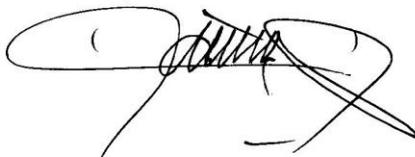
Tim Penguji

1. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.A.P
3. Ahmad Taufik, S.IP., M.A.P
4. Hardianto Hawing, S.T., M.A

()

()

()

()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Fachrul Nur Faisal

Nomor Induk Mahasiswa : 105641109920

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Muh. Fachrul Nur Faisal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Smart Governace* Dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas Di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Bacce”’, Sebagai salah satu syarat mendapat Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan kepada kita semua. Penulis berharap apa yang dipaparkan dalam skripsi ini dapat memberikan informasi baru bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat Penulis hargai.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang tua saya tercinta ayahanda Muh Faisal Hm dan ibunda Harpina Faisal yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga dan terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa baik, terimakasih sudah menemani penulis berjuang sejauh ini. Penulis menyadari ucapan terimakasih ini sangat tidak sebanding dengan pengorbanan kedua orang tua penulis dalam membimbing dan menemani penulis berjuang sejauh ini. penulis juga sangat meminta maaf kepada kedua orang tua penulis apa bila selama ini penulis masih sering melakukan kesalahan. Terimakasih atas setiap iringan doa di setiap sujudnya

hingga penulis sampai pada saat seperti ini. Penulis sangat berharap suatu saat nanti penulis dapat membalas segala pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua penulis bagi penulis.

2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Hamrun S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tidak ternilai harganya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan baik.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang juga telah membantu peneliti dan telah membina jurusan ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga
7. Kepada seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi, khususnya untuk bapak, ibu yang selalu memudahkan dalam pengurusan

berkas persyaratan ujian skripsi dan selalu memberikan dorongan untuk semangat

8. Kepada Ibu Nanin Sudiar Selaku selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kota Makassar beserta staf, Bapak Reza Maulana, S.Kom., MT selaku Tenaga Ahli bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar beserta staf, dan Ibu Andi Srihani., Sh selaku Staf UPTD PPA Kota Makassar yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada keluarga saya yang juga telah banyak membantu baik dalam material, moril, dan dukungannya selama ini, terimakasih telah mendukung saya sejauh ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis Ketika penulis sedang merasa tidak baik-baik saja.
10. Penulis juga sangat berterimakasih kepada sahabat-sahabat penulis khususnya Azizah, Fina, Restu, Ana, Hilma, Inna, Amar, Iwan, Iyan, Faiz, Ian, Ewink, dan Fatur Terima kasih atas dukungan moril dan motifasinya baik di kampus maupun di luar kampus, terimakasih telah menemani penulis berproses dari semester satu hingga sekarang, terimakasih juga karena sejauh ini sudah menjadi saudara taksedarah, semoga kebersamaan kita sampai tua dan membawa kenangan indah.
11. Terimakasih kepada keluarga besar IPC atas kebersamaanya selama ini, canda tawa yang di berikan dalam kelas yang sangat berkesan bagi penulis.
12. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

13. Penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri karena sudah mau berjuang sejauh ini walaupun sudah banyak suka duka yang di lalui, dan sudah banyak kata capek terlontar dari mulut penulis tapi penulis tetap bangga kepada diri sendiri karena mampu bertahan hingga sejauh ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai Upaya yang telah di sumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Makassar, 28 Juli 2024

Muh. Fachrul Nur Faisal

ABSTRAK

Muh. Fachrul Nur Faisal. Tahun 2024 Nuryanti Mustari, Hamrun. Smart Governanace Dalam Pembangunan Inkulsif Kota Cerdas di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Bacce).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *smart governance* dalam pembangunan inklusif di Kota Makassar, dengan fokus pada aspek transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi publik-swasta melalui penggunaan aplikasi BACCE (Balla Amma Caradde). *Smart governance* merupakan konsep yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini, tiga indikator utama smart governance dianalisis, yaitu transparansi, e-participation, dan kolaborasi publik-swasta.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, termasuk DISKOMINFO, DP3A, dan UPTD PPA Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah ditingkatkan melalui penyebaran informasi kebijakan dan program secara luas menggunakan *website* resmi pemerintah, media sosial, dan aplikasi BACCE. Namun, tantangan rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat masih perlu diatasi.

E-participation melalui aplikasi BACCE menunjukkan potensi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan anak-anak dalam isu-isu kekerasan dan inklusi gender. Meskipun demikian, adopsi aplikasi ini menghadapi hambatan teknis dan pemahaman teknologi yang rendah. Dalam hal kolaborasi publik-swasta, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai MoU dengan sektor swasta, integrasi dan partisipasi aktif dari sektor tersebut masih memerlukan peningkatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk menerapkan smart governance di Kota Makassar, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalami pengaruh literasi teknologi terhadap efektivitas e-participation dan mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Kata Kunci: *Smart Governance*, Pembangunan Inklusif, Kota Cerdas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN YIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian terdahulu	9
B. Teori Dan Konsep	13
1. Konsep <i>Smart governance</i>	13
2. Pembangunan Inklusif	21
3. Konsep <i>Smart City</i> (Kota Cerdas).....	27
C. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Informan Penelitian.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Objek Penelitian	40
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Overlay visualization</i>	10
Gambar 2.2 Penelitian Terdahulu	13
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Inisiatif DP3A Kota Makassar memastikan transparansi informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Aplikasi BACCE.....	67
Gambar 4.2 Inisiatif UPTD PPA Kota Makassar memastikan transparansi dengan menyediakan aplikasi BACCE yang dapat diunduh oleh semua kalangan melalui Play Store atau App Store	69
Gambar 4.3 Upaya DP3A Kota Makassar dalam meningkatkan E-Participation perempuan dan anak melalui Aplikasi Bacce.	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 cluster Implementasi Smart Governance Dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas	13
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	36
Tabel 4.1 Rekap kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di kota makassar tahun 2021-2023	68
Tabel 4.2 Rekap laporan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di kota makassar tahun 2021-2023	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi dan digital saat ini, pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang butuh akan informasi, di mana ruang dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Dalam era modern yang ditandai oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, perkotaan di seluruh dunia menghadapi tantangan yang semakin rumit. Pertumbuhan populasi perkotaan yang pesat, urbanisasi yang kuat, dan masalah-masalah seperti ketimpangan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta penyediaan layanan publik yang efisien, semuanya menjadi prioritas utama bagi pemerintah kota. Di tengah dinamika ini, konsep "*Smart governance*" atau tata kelola cerdas telah muncul sebagai paradigma yang bertujuan untuk mengatasi tantangan perkotaan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan data

Penerapan *Smart governance* di Indonesia adalah langkah progresif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan kualitas pelayanan pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Berbagai inisiatif, termasuk e-government, smart cities, dan transparansi keuangan, telah diambil untuk mencapai tujuan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam pengadopsian teknologi dalam administrasi publik. Penerapan e-government telah memudahkan

warga negara dalam mengakses layanan pemerintah secara online, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi administrasi.

Konsep *smart city* telah menjadi fokus dalam pengembangan kota-kota besar, dengan penggunaan TIK untuk mengelola transportasi, lingkungan, dan layanan publik. Hal ini memperbaiki kualitas hidup warga, terutama di kota-kota yang padat penduduk. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemerintah telah meningkat melalui portal dan aplikasi yang memungkinkan akses publik terhadap informasi penting dan pelaporan aduan terhadap praktik korupsi. Secara keseluruhan, penerapan *Smart governance* di Indonesia adalah langkah penting dalam menuju pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan terhubung dengan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Dengan upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Di Indonesia, salah satu kota yang berupaya untuk mengadopsi konsep *smart city* dan pembangunan inklusif adalah Kota Makassar. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan manusia yang menjadi pijakan dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, tantangan-tantangan kompleks seperti ketidakmerataan akses terhadap layanan publik, kesenjangan sosial-ekonomi, dan tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi tetap menjadi perhatian serius.

Penerapan prinsip *Smart governance* dalam pembangunan kota cerdas di Makassar mampu merespon dinamika dan kompleksitas perkotaan saat ini. *Smart*

governance mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat keterlibatan warga, mengoptimalkan penyediaan layanan publik, dan meningkatkan responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat lebih mudah mengumpulkan data, menganalisis tren, dan merespon perubahan dengan lebih cepat dan efektif.

Penerapan *Smart governance* di Kota Makassar adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan kualitas pelayanan publik di kota tersebut. Hal ini sejalan dengan berbagai undang-undang dan regulasi nasional yang mendukung konsep *Smart governance* dan *smart city* di seluruh Indonesia.

Kota Makassar, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, merasa perlu untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna memenuhi tuntutan warganya akan layanan publik yang lebih baik. Inisiatif *Smart governance* di kota ini juga berlandaskan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendorong Kota Makassar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Dalam upaya menciptakan kota cerdas yang inklusif, Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan berbagai inisiatif yang didukung oleh regulasi dan undang-undang nasional. Salah satu inisiatif atau inovasi tersebut adalah aplikasi

Becce, yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Aplikasi ini memungkinkan warga Makassar melaporkan berbagai masalah di lingkungan mereka secara langsung, mulai dari infrastruktur yang rusak hingga masalah kebersihan dan keamanan.

Implementasi aplikasi Becce sejalan dengan prinsip-prinsip *Smart governance* yang tercantum dalam berbagai regulasi nasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik yang transparan. Aplikasi Becce memfasilitasi keterbukaan ini dengan memungkinkan warga untuk mengakses informasi mengenai laporan yang mereka ajukan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aplikasi Becce memungkinkan partisipasi elektronik (*E-Participation*) di mana warga dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah tanpa harus hadir secara fisik. Ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap inklusi digital, memastikan bahwa semua warga, termasuk yang mungkin mengalami keterbatasan fisik atau geografis, dapat berpartisipasi dalam proses tata kelola kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menggaris bawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan

berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, aplikasi Becce dikembangkan melalui kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan perusahaan teknologi swasta. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya dan keahlian dari sektor swasta untuk menciptakan solusi teknologi yang canggih dan efisien, mendukung prinsip kolaborasi publik-swasta yang efektif.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Aplikasi Becce, sebagai platform digital, diatur oleh undang-undang ini untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dipertukarkan melalui aplikasi tersebut dilindungi dengan baik, sehingga menjamin keamanan dan privasi pengguna.

Dengan mengintegrasikan aplikasi Becce dalam strategi pembangunan kota cerdas, Pemerintah Kota Makassar tidak hanya menerapkan konsep *Smart governance*, tetapi juga mematuhi dan memanfaatkan kerangka regulasi yang ada untuk menciptakan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Aplikasi ini tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga platform untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap masalah ditangani dengan cepat dan tepat.

Secara keseluruhan, aplikasi *Becce* merupakan contoh nyata dari penerapan *Smart governance* dalam pembangunan inklusif kota cerdas di Kota Makassar yang didukung oleh berbagai undang-undang dan regulasi. Aplikasi ini memperlihatkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi antar berbagai pihak, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga kota, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Kota Makassar juga berkomitmen untuk mengurangi birokrasi, mengoptimalkan infrastruktur kota dengan konsep *smart city*, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan berbagai regulasi nasional, seperti Permendagri tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memberikan panduan untuk pengembangan *sistem e-government* di daerah.

Secara keseluruhan, penerapan *Smart governance* di Kota Makassar adalah upaya yang signifikan dalam memodernisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan terus mengikuti regulasi nasional yang berlaku dan memperbaiki infrastruktur TIK, Kota Makassar berada pada jalur yang tepat untuk menjadi salah satu kota pintar yang sukses di Indonesia.

Namun, penerapan *Smart governance* juga dapat menimbulkan tantangan, seperti masalah privasi dan keamanan data, kesenjangan digital antar kelompok masyarakat, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat yang lebih tua atau kurang terdidik. Oleh karena itu, perlu

adanya pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam mengembangkan model *Smart governance* di Makassar, yang mampu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif bagi seluruh warga kota.

Dalam konteks Kota Makassar, salah satu aspek kunci untuk memastikan pembangunan kota cerdas yang inklusif adalah melalui partisipasi publik yang aktif dan merata dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi publik menjadi penting karena memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat lokal diakui dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan kota. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi.

Dalam konteks ini, skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep *Smart governance* dalam pembangunan inklusif Kota Makassar, dengan fokus pada aspek partisipasi publik. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana partisipasi publik dapat ditingkatkan secara efektif dalam konteks pembangunan kota cerdas yang inklusif di Kota Makassar. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan relevan bagi pemerintah kota dalam upaya meningkatkan partisipasi publik dan mencapai pembangunan kota cerdas yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang *Smart governance* dan pembangunan kota cerdas, masih sedikit penelitian yang secara khusus fokus pada aspek inklusifitas dalam konteks Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dan memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi penerapan *Smart governance* dalam pembangunan inklusif di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *Smart governance* dapat diaplikasikan dalam konteks pembangunan inklusif di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis penerapan *Smart governance* dalam konteks pembangunan inklusif di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *Smart governance* dalam konteks pembangunan inklusif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung menjadi tolak ukur untuk menjadi sebuah penelitian baru. Penelitian berjudul "*Smart governance* Dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar" yang menggunakan data olah data *vosviewer* untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai yang digunakan untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang di temukan sebagai berikut.



Gambar 2.1 *Overlay Visualization*

Berdasarkan hasil dari penelusuran kepustakaan dengan menggunakan *publish or perish* ditemukan 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2018-2023 yang dimana artikel-artikel tersebut berkaitan erat dengan kata kunci *Smart governance* Dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas. Artikel-artikel ini

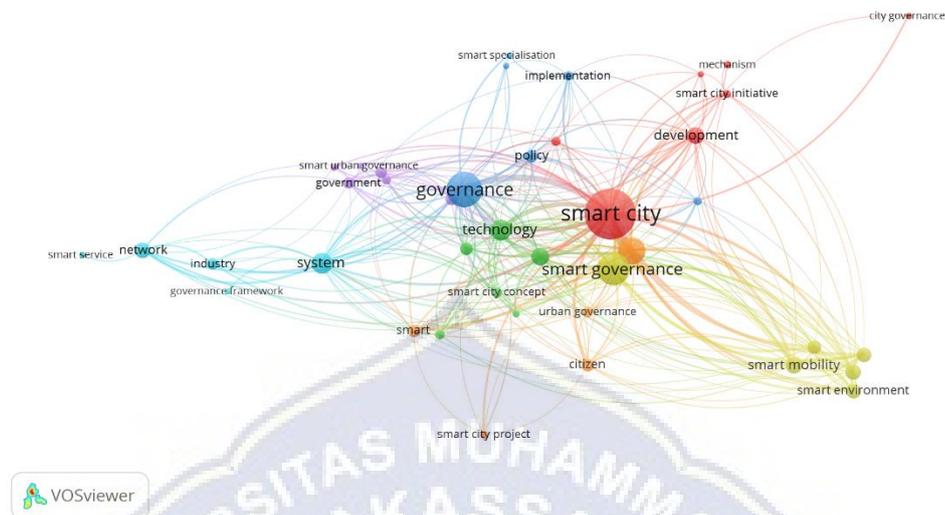
kemudian dikelola menggunakan *vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian dari peneliti.

Dari hasil olah data *vosviewer* ada 41 *items* dan beberapa penelitian yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang membahas tentang *Smart governance*. Ada beberapa penelitian tentang *Smart governance* seperti, penelitian yang berfokus pada bagaimana konsep *Smart governance* diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar (Rahmat Muhajir, Nasrulhaq, Nurbiah Tahir 2022). Atau penelitian/berfokus pada implementasi *Smart governance* dalam suatu program tertentu di Kota Makassar, yaitu Program Rindu Capil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Fokusnya adalah bagaimana konsep *Smart governance* diterapkan dalam program ini dan bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas layanan dan efisiensi administratif di dalamnya. Dalam penelitian yang berjudul "Strategi Implementasi *Smart governance* di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Program Rindu Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil)" (Sri Wahyuni, Alwi, Nur Indrayati Nur Indar (2021). Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Yuliarty Dwi Putri Ma'mur, Muchlas M. Tahir, St. Nurmaeta yang berjudul "*Smart governance* dalam Program *Homecare Dottorotta* di Kota Makassar" (2021) yang berfokus/pada implementasi konsep *Smart governance* dalam konteks program *Homecare Dottorotta* di Kota Makassar. *Dottorotta* adalah penyedia layanan perawatan kesehatan di rumah. Penelitian ini kemungkinan akan membahas bagaimana *Smart governance* digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan

homecare, efisiensi administratif, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan kesehatan ini.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas *Smart governance* belum ada yang berfokus pada pengembangan kota secara keseluruhan dengan pendekatan *Smart governance*, khususnya dalam konteks pembangunan inklusif dan cerdas. Fokusnya adalah bagaimana konsep *Smart governance* dapat digunakan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih pintar, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kota.

Penelitian ini lebih berfokus pada aspek pembangunan kota secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan *Smart governance*. Lebih dari sekadar proses administratif, penelitian ini akan membahas bagaimana *Smart governance* berkontribusi pada pembangunan kota yang inklusif dan cerdas. Ini mungkin mencakup penerapan teknologi untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik, pengembangan infrastruktur pintar, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan upaya untuk memastikan bahwa pembangunan kota memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 2.2 Penelitian Terdahulu

Selanjutnya dalam melakukan analisis analisis *Smart governance* dalam pembangunan inklusif kota cerdas peneliti menggunakan aplikasi *vosviwer* yang akan menampilkan pemetaan yakni dalam bentuk tiga *visualisasi e governance, governace, smarcity, technology* dari gambar di atas dapat di jelaskan sebagai berikut.

<i>Cluster 1</i> (7 Items)	(Merah) <i>City governance, connection, development, Smart city, mechanism, smart city initiative, smart technology.</i>
<i>Cluster 2</i> (6 Items)	(Hijau) <i>Application, Economy, Inovation, Smart city concept, Smart healthcare, Technology.</i>
<i>Cluster 3</i>	(Biru) <i>Governance, implementation,</i>

(6 Items)	<i>policy, Smart governance, smart specialisation, smart specialisation strategy.</i>
Cluster 4 (6 Items)	(Kuning) <i>Smart economy, smart environment, Smart governance, smart living, smart mobility, smart person.</i>
Cluster 5 (6 Items)	(Ungu) <i>E governance, government, information, service, smart city governance, smart urban governance.</i>
Cluster 6 (5 Items)	(Biru muda) <i>Governance framework, industry, network, smart service, system.</i>
Cluster 7 (5 Items)	(Orange) <i>Citizen, city, smart, smart city project, urban governance.</i>

Tabel 2.1 Cluster Implementasi *smart Governace* dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas

B. Teori Dan Konsep

1. Konsep *Smart Governance*

Smart governance adalah sebuah konsep pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta termasuk tata kelola kota pemerintahan daerah yang cerdas dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam implementasinya, *Smart governance* dapat mengintegrasikan

beberapa sistem seperti *E-Government*, *E-Democracy*, dan *E-Participation* (Eko Sodikul, 2023).

Konsep *Smart governance* Diterapkan *Smart governance* dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam pemerintahan, seperti perencanaan pembangunan, manajemen sumber daya manusia, keuangan, pengawasan, dan pelayanan public (Eko Sodikul, 2023).

Smart governance adalah salah satu elemen kunci dalam konsep smart city atau kota cerdas yang diuraikan oleh Anna Visvizi dan Miltiadis Lytras dalam publikasi mereka pada tahun 2018. Menurut Visvizi dan Lytras, *Smart governance* mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. *Smart governance* bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara pemerintah dan warga (Anna Visvizi dan Miltiadis Lytras, 2018).

Elemen Utama *Smart governance* Menurut Visvizi dan Lytras:

a. Penggunaan TIK:

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan proses administrasi, dan meningkatkan layanan publik.

b. Transparansi:

Penyediaan akses yang lebih mudah dan terbuka terhadap informasi publik. Transparansi ini membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan warga untuk memantau kinerja pemerintahan secara real-time.

c. Partisipasi Publik:

Mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Partisipasi publik yang aktif memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan.

d. Kolaborasi dan Kerjasama:

Mengedepankan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif bagi tantangan perkotaan.

e. Efisiensi dan Responsivitas:

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini termasuk penggunaan data dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Menurut Visvizi, A., & Lytras, M. D. (2018) dalam buku mereka "*Smart Cities: Issues and Challenges*", *smart governance* dalam aspek partisipasi publik dapat diukur dengan tiga indikator utama:

a. Transparansi:

Transparansi dalam smart governance melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan data dan informasi publik secara terbuka. Ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan data memungkinkan warga untuk memahami kebijakan dan program pemerintah dengan lebih baik.

b. *E-Participation*:

E-participation mengacu pada partisipasi warga dalam proses pemerintahan melalui platform digital. Ini memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara online, konsultasi publik, dan diskusi forum digital. Tujuan dari e-participation adalah untuk meningkatkan keterlibatan warga dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan.

c. Kolaborasi Publik-Swasta:

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta adalah penting untuk keberhasilan implementasi *smart cities*. Kolaborasi ini membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang mungkin dihadapi oleh pemerintah. Melalui kemitraan ini, pemerintah dapat memanfaatkan inovasi dan efisiensi yang ditawarkan oleh sektor swasta untuk meningkatkan layanan publik, termasuk pengembangan teknologi bersama, proyek infrastruktur, dan penyediaan layanan yang mendukung program *smart cities*.

Contoh Implementasi *Smart governance*:

Visvizi dan Lytras menyoroti bahwa penerapan *Smart governance* tidak hanya melibatkan pengadopsian teknologi baru, tetapi juga perubahan dalam struktur dan proses pemerintahan. Contoh implementasi *Smart governance* dapat dilihat dalam penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memungkinkan warga untuk melaporkan masalah lingkungan, memberikan masukan terhadap kebijakan, dan mendapatkan informasi mengenai layanan publik.

Mengacu pada pemikiran Anna Visvizi dan Miltiadis Lytras, aplikasi Becce di Kota Makassar adalah contoh konkret bagaimana *Smart governance* dapat diterapkan dalam konteks lokal. Aplikasi ini memanfaatkan TIK untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi antara pemerintah dan warga. Melalui aplikasi Becce, warga dapat melaporkan masalah lingkungan, infrastruktur, dan pelayanan publik secara real-time. Pemerintah Kota Makassar dapat merespons laporan tersebut dengan cepat, meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan publik.

Smart governance berkaitan erat dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang ada beberapa indikator dan dimensi yang juga perlu diperhatikan agar pengaplikasian *Smart governance* lebih sempurna. Indikator dalam pelaksanaan *Smart governance* juga sangat penting dalam implemntasinya menurut Cohen terdapat tiga 44 indikator dalam pelaksanaan *Smart governance* yaitu peratama , memungkinkan

tata kelola pasokan dan kebijakan sisi permintaan , Transparansi dan Data Terbuka dan pelaksanaan TIK dalam *E-Government* (Annisah, 2017).

Beberapa contoh penerapan *Smart governance* adalah:

- a. *E-government*: Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi publik, seperti pelayanan publik, pengarsipan, dan komunikasi dengan masyarakat.
- b. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Pemerintah dapat memanfaatkan data yang terkumpul dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dan pengawasan program pemerintah.
- c. Pembangunan *Smart City*: Konsep *Smart governance* dapat diterapkan dalam pembangunan *smart city*, di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik.

Smart governance tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Beberapa manfaat dari *Smart governance* antara lain:

- a. Efisiensi biaya dan Waktu

Smart governance memungkinkan pemerintah untuk menghemat biaya dan waktu dalam mengambil keputusan dan menyediakan layanan publik. Penggunaan teknologi dan data analisis membantu pemerintah memproses data lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat.

b. Transparansi yang Nyata

Smart governance juga meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian layanan publik. Informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

c. Keterlibatan masyarakat

Smart governance memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik.

Melalui aplikasi dan platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan pengamatan tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, serta memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

d. Kualitas hidup masyarakat

Dalam jangka panjang, *Smart governance* dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Dengan menerapkan solusi yang inovatif dan efektif, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

e. Meningkatkan Efektivitas kebijakan Publik

Smart governance juga membantu meningkatkan efektivitas kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui pengumpulan dan analisis data, pemerintah dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara lebih akurat dan merancang kebijakan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

f. Kekurangan *Smart governance*

Meskipun *Smart governance* menawarkan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1) Keterbatasan sumber daya Manusia

Penerapan *Smart governance* membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengelola teknologi dan data. Namun, masih banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia dengan keterampilan tersebut.

2) Tantangan keamanan Siber

Peningkatan penggunaan teknologi dan data dalam *Smart governance* juga berarti meningkatkan potensi risiko keamanan siber. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari serangan siber dan mematuhi standar keamanan yang ditetapkan.

3) Ketergantungan pada Teknologi

Ketergantungan pada teknologi dalam *Smart governance* dapat menjadi masalah jika terjadi kerusakan atau pemadaman sistem.

Pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki rencana darurat dan backup sistem yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut.

Smart governance atau tata kelola pemerintahan kota yang pintar adalah konsep sekaligus praktik bagaimana mengelola manajemen dan tata kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi

dan adopsi teknologi yang terpadu. Salah satu ciri *Smart governance* adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. *Smart governance* direkomendasikan menjadi dasar bagi keberhasilan pembangunan dimensi-dimensi *smart city* lainnya (Susanto, 2019). Proses implementasi *Smart governance* membutuhkan proses yang panjang, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk bisa mewujudkan konsep tersebut.

Konsep smart government menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu badan / instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. (Bappenas, 2015).

Konsep smart government ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep *Smart City*, yaitu :

- a. Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat
- b. Mengembangkan operasional agar lebih efisien
- c. Meningkatkan manajemen organisasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur
- d. Membuat *system database* yang dapat diakses secara umum
- e. Mengolah informasi data yang *up-todate (real time)*.
- f. Menggunakan metode yang mutakhir.

g. Adanya koordinasi antar *stakeholders*

Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda baik dari segi budaya maupun ketersediaan infrastruktur. Maka dalam perencanaan *Smart governance* harus berpedoman pada kebutuhan, kondisi dan visi misi daerah. Perencanaan *Smart City* di Indonesia harus dimulai dari desa (Supangkat, 2015).

Perencanaan *Smart governance* merupakan ujung tombak perencanaan *Smart City*. Karena *Smart City* dimulai dengan adanya *Smart governance*. Tanpa adanya *Smart governance* mustahil untuk mewujudkan *Smart City* (Scytl, 2015) Sehingga perencanaan *Smart governance* haruslah mengacu pada konsep *Smart City* dan konsep perencanaan tata kelola yang banyak dikembangkan dengan cara menggunakan *framework- framework* yang ada. Sebagai bahan perbandingan, pemerintah Singapura membuat perencanaan *Smart governance* dengan mengedepankan tingkat kapabilitas sebagai indikator utama (Delloite, 2015).

2. Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memberi ruang, membuka akses, serta melibatkan atau partisipasi semua warga negara dan komponen bangsa. Semua warga negara diberi ruang dan didorong untuk terlibat dalam proses dan mendapatkan akses untuk memperoleh layanan, fasilitas publik, atau apapun yang disediakan oleh negara dan penyedia layanan publik yang lain.

Istilah pembangunan inklusif dirunut dari idenya Amartya Sen tentang pertumbuhan inklusif. Ekonom India tersebut berpendapat bahwa pemerintah dapat mencapai konsep pertumbuhan dengan meningkatkan kesetaraan dan

mengurangi ketimpangan antara yang miskin dan kaya. Dan pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tapi juga aspek sosiologis termasuk akses pada layanan publik, keamanan, pemenuhan hak asasi manusia, dan rasa adil. Penelitian juga menghubungkan pertumbuhan inklusif dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebahagiaan mereka. Pertumbuhan yang bersifat inklusif tercapai jika semua masyarakat merasa bahagia.

Pembangunan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok / kaum yang terpinggirkan/ldi dalam proses pembangunan. Saat ini, hampir di semua negara, difabel merupakan salah satu dari kelompok yang terpinggirkan. Difabel masih mendapatkan kesulitan, untuk mendapatkan perhatian sebagai objek dalam program – program pembangunan, sekaligus sebagai subjek / pelaku aktif.

Pembangunan inklusif dapat dipahami melalui makna kata “pembangunan” dan “inklusif”. “Pembangunan” merupakan proses untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas–tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan kesehatan (Kanbur dan Rauniyar, 2009). Sementara itu, “inklusif” berarti kondisi yang memastikan adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna (tanpa diskriminasi) baik sebagai objek maupun subjek, dan keterlibatan ini bukan sekadar untuk menghindari konflik sehingga membuat individu/kelompok memiliki rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi (*Miller dan Katz, 2009*).

Dengan mengakomodasi arti kedua kata tersebut, pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal, baik sebagai objek maupun subjek, dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut (*IDDC*, 2009; *Wood*, 2014). Untuk mewujudkan pembangunan inklusif, dibutuhkan proses pembangunan yang inklusif pula. Dengan kata lain, terwujudnya pembangunan inklusif di antaranya ditandai dengan adanya proses untuk mewujudkan pembangunan inklusif, serta terwujudnya pembangunan inklusif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan nondiskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang (*CBM*, 2014).

Sementara itu, menurut, *Wirotomo* (2015) model pembangunan inklusif adalah suatu bentuk model pembangunan sosial yang paling mutakhir. Pada model pembangunan sosial ini harus menggunakan pendekatan yang tidak bersifat sektoral dan ekonomi, meski mekanisme pembangunan memberi budget secara sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya), tetapi pembangunan haruslah di arah ke pembangunan holistik. Konsep pembangunan harus diletakkan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan, begitupun fenomena masyarakat dalam bentuk interaksi dan interrelasi. Secara ringkas pembangunan sosial haruslah membangun interaksi sosial dan interrelasi, sehingga ekonomi mampu menciptakan kehidupan sosial dan budaya dengan cara berorientasi

kepada kualitas sosial budaya dan secara teoritis. Model pembangunan sosial seperti ini akan mampu menciptakan masyarakat inklusif. Tujuan dari pembangunan inklusif adalah membangun kualitas kehidupan sosial budaya (*social cultural quality of life*), dan komponen yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kualitas kehidupan sosial budaya antara lain struktur sosial, kultur, dan proses sosial.

Prinsip-Prinsip Pembangunan Inklusif: Mewujudkan Kesetaraan dan Kesejahteraan yaitu sebagai berikut:

a. Kesetaraan dalam Akses dan Peluang

Prinsip utama dalam pembangunan inklusif adalah kesetaraan dalam akses dan peluang bagi semua warga. Ini berarti bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau fisiknya, memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Prinsip ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.

b. Partisipasi Aktif dan Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan adalah prinsip yang sangat penting. Masyarakat harus memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan keterlibatan masyarakat dalam merancang kebijakan dan program, solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat dihasilkan. Prinsip ini mendorong akuntabilitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

c. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Pemberdayaan ekonomi dan sosial merupakan prinsip yang menekankan pentingnya memberikan individu dan kelompok masyarakat akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ini termasuk peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak, akses terhadap modal dan pelatihan, serta pengakuan terhadap hak-hak ekonomi. Pemberdayaan ekonomi membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

d. Perlindungan dan Keadilan Sosial

Prinsip perlindungan dan keadilan sosial menuntut adanya jaminan hak dan perlindungan bagi semua warga, terutama kelompok rentan. Ini melibatkan pembentukan sistem perlindungan sosial yang kuat untuk mengatasi risiko ekonomi dan sosial. Prinsip ini juga mendorong penerapan kebijakan yang adil dan transparan untuk mengurangi kesenjangan dan diskriminasi.

e. Akses Terhadap Layanan Publik Berkualitas

Semua warga harus memiliki akses terhadap layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya layanan publik sebagai hak dasar dan mendukung terciptanya kesempatan yang setara bagi semua individu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

f. Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan

Prinsip pembangunan inklusif juga harus sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. Ini berarti bahwa pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta memastikan bahwa

sumber daya alam yang ada dijaga dan dikelola dengan baik untuk generasi mendatang.

3. Konsep *Smart City* (Kota Cerdas)

Konsep Kota Cerdas (*smart city*) awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Sebelumnya berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama digital city atau Kota Cerdas (*smart city*). Intinya Kota Cerdas (*smart city*) ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien.

Versi IBM, Kota Cerdas (*smart city*) adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Kota Cerdas (*smart city*) adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Kota Cerdas (*smart city*) cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya, Kota Cerdas (*smart city*) didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, 2010:3). Konsep Kota Cerdas (*smart city*) pada umumnya meliputi:

- a. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
- b. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur.
- c. Kota Cerdas (*smart city*) dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota.
- d. Kota Cerdas (*smart city*) membuat kota lebih efisien dan layak huni.
- e. Penggunaan smart computing untuk membuat Kota Cerdas (*smart city*) dan fasilitasnya saling berhubungan dan efisien.

Kota Cerdas (*smart city*) mempunyai 6 dimensi, yaitu *Smart Government*, *Smart Economy*, *Smart Live*, *Smart Living*, *Smart People*, dan *Smart Mobility*. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya.

- a. Ekonomi pintar (inovasi dan persaingan), semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.
- b. Mobilitas pintar (transportasi dan infrastruktur), pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
- c. Masyarakat pintar (kreativitas dan modal sosial), pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal

usaha (*human capital*), maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

- d. Lingkungan pintar (keberlanjutan dan sumber daya), lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar.
- e. Cerdas hidup (kualitas hidup dan kebudayaan), berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

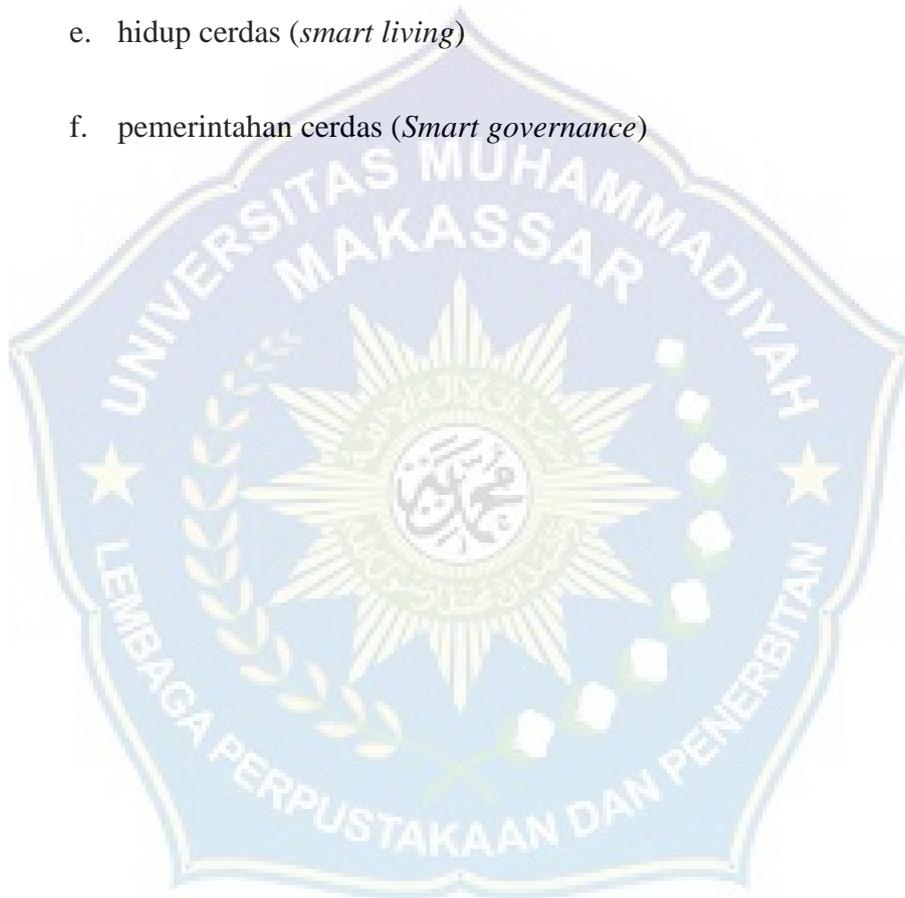
Pemerintahan yang cerdas (pemberdayaan dan partisipasi), kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih.

Karakteristik bahwa kota pintar (juga masyarakat, klaster bisnis, aglomerasi perkotaan atau wilayah) menggunakan teknologi informasi untuk:

- a. Membuat lebih efisien penggunaan infrastruktur fisik (jalan, lingkungan dibangun dan aset fisik lainnya) melalui intelijen dan data buatan analisis untuk mendukung, pengembangan budaya yang kuat dan sehat ekonomi sosial.
- b. Terlibat secara efektif dengan orang-orang lokal dalam pemerintahan lokal dan keputusan dengan menggunakan proses inovasi terbuka dan e-partisipasi, meningkatkan kecerdasan kolektif dari lembaga kota melalui *e-governance*, dengan penekanan pada partisipasi warga dan codesain.
- c. Belajar, beradaptasi dan berinovasi dan dengan demikian merespon lebih efektif dan segera untuk mengubah keadaan dengan meningkatkan kecerdasan kota.

Menurut *IEEE Smart Cities.org*, sebuah kota pintar menyatukan teknologi, pemerintah dan masyarakat untuk memungkinkan karakteristik sebagai berikut:

- a. ekonomi pintar (*smart economy*)
- b. mobilitas cerdas
- c. lingkungan cerdas (*smart environment*)
- d. orang pintar (*smart people*)
- e. hidup cerdas (*smart living*)
- f. pemerintahan cerdas (*Smart governance*)



C. Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk menganalisis implementasi konsep *Smart governance* dalam upaya Pembangunan Inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan *Smart governance* dapat membantu mencapai pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan di tengah transformasi menjadi Kota Cerdas. Penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana konsep *Smart governance* diterapkan dalam berbagai aspek pembangunan di Kota Makassar, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyediaan layanan publik. Penelitian juga ini akan menyelidiki peran partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Cerdas Makassar, serta bagaimana

Smart governance dapat memperkuat partisipasi tersebut, dan memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang marginal atau rentan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi *Smart governance* dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar, dengan fokus pada aspek partisipasi publik. Partisipasi publik dianggap sebagai elemen kunci dalam pembangunan kota yang inklusif, di mana melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih efektif.

Dalam konteks ini, penelitian akan difokuskan pada tiga indikator utama dari partisipasi publik dalam *Smart governance*:

1. Transparansi:

Penelitian akan menginvestigasi sejauh mana pemerintah Kota Makassar memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan proyek pembangunan kota. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

2. E-Partisipasi

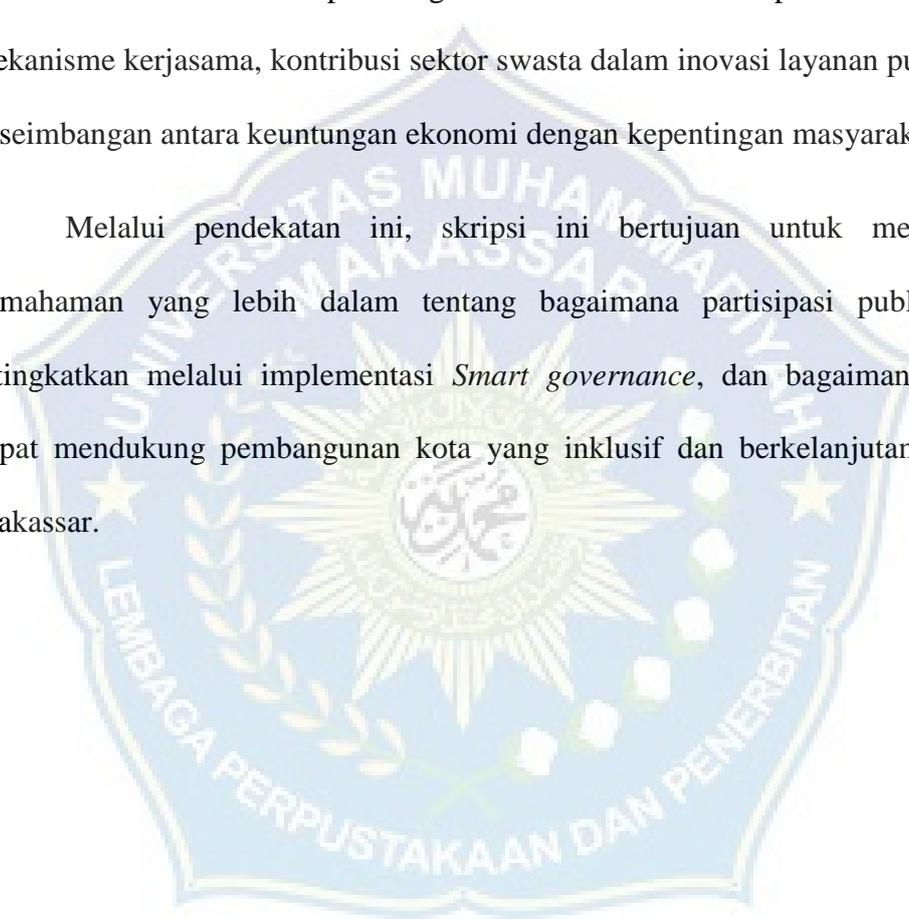
Penelitian akan mengeksplorasi penggunaan platform digital oleh pemerintah Kota Makassar untuk melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik, pemungutan suara, dan penyampaian masukan. Ini termasuk analisis terhadap

sejauh mana pemerintah memanfaatkan media sosial, aplikasi seluler, dan situs *web* resmi untuk mendengar suara dan aspirasi masyarakat.

3. Kolaborasi Publik-Swasta

Penelitian akan menyelidiki kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dan sektor swasta dalam pembangunan kota. Ini mencakup analisis terhadap mekanisme kerjasama, kontribusi sektor swasta dalam inovasi layanan publik, dan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan kepentingan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana partisipasi publik dapat ditingkatkan melalui implementasi *Smart governance*, dan bagaimana hal ini dapat mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan setelah seminar proposal dan setelah surat izin penelitian telah dikeluarkan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kota Makassar sedang mengalami perkembangan pesat, terutama dalam konteks transformasi menjadi Kota Cerdas. Ini membuat Kota Makassar menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan untuk memahami bagaimana *Smart governance* diimplementasikan dalam konteks perkotaan yang berkembang di Indonesia.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah penelitian deskriptif untuk menemukan gambaran mengenai strategi implementasi smart governance. Fokus penelitian mengarah pada strategi implementasi *smart governance* yang telah dilakukan di sektor pelayanan. Tingkat keberhasilan strategi *smart governance* diperoleh dengan melihat tiga aspek yaitu penggunaan teknologi, visi, dan kolaboratif.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari suatu objek yang

ada diteliti (responden) atau diperoleh informasi dasar di lapangan, instrumen yang/1peneliti gunakan yaitu wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui membaca atau belajar perpustakaan, buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut Internet, dokumen kelembagaan dan laporan berkaitan dengan kebutuhan informasi penelitian

D. Informan Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, maka sebagai sumber dalam memperoleh data informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah informan penelitian. Menurut Arikunto (2006;145), informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti. Istilah ‘informan’ ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

Adapun sebagai informan/responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Reza Maulana, S.Kom., MT	“RZ”	Staff Tenaga Ahli bidang Aptika DISKOMINFO Kota Makassar
2.	Nanin Sudiar	“NS”	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DPPPA Kota Makassar
3.	Nurfawardani. S.,KOM	“N”	Staff DP3A Bidang Perlindungan Khusus Anak
4.	Andi Srihani., Sh	“AS”	Staff UPTD PPA Kota Makassar

Tabel 3.1 Tabel Informan

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi penelitian ini dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, dari berbagai sumber, dan dalam berbagai cara. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur pengumpulan informasi yang dapat digunakan dengan cepat dan pasti sesuai dengan masalah penelitian dan sasaran penelitian, sehingga ahli menggunakan beberapa strategi yang dapat membuat penelitian ini lebih mudah, tepatnya.

1. Observasi

Observasi diketahui bahwa strategi pengumpulan informasi di mana observasi dibuat dengan memasukkan catatan tentang kondisi atau perilaku item tujuan. Untuk situasi ini, ahli menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung terkait dengan pelaksanaan e-administrasi dalam peningkatan bagian administrasi cemerlang di bagian Rante Mario, sub-wilayah Tommo, wilayah Mamuju .

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pendekatan pengumpulan data dengan cara memimpin pertemuan langsung (surat menyurat langsung) dengan saksi-saksi sesuai jenis informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam suatu pertemuan, terdapat siklus intuitif antara penanya dan saksi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menyempurnakan teknik tersebut observasi dan wawancara, serta meningkatkan keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan dokumenter industri dan dapat

digunakan sebagai bahan untuk memverifikasi keakuratan informasi.

F. Teknik Pengabsahan Data

Metode legitimasi informasi dilakukan untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian logis untuk mengtes informasi yang diperoleh. Strategi persetujuan informasi terdiri dari tiga, yaitu triangulasi sumber spesifik, triangulasi khusus, dan triangulasi waktu. Klarifikasinya diketahui bahwa sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber, khususnya pengujian keterpercayaan suatu informasi, dilakukan dengan memeriksa informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber. Informasi yang didapat dipecah oleh para ilmuwan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi triangulasi, khususnya mengtes keterpercayaan suatu informasi, dilakukan dengan benar-benar melihat informasi terhadap sumber yang serupa dengan berbagai metode. Misalnya, pengecekan informasi dapat dilakukan melalui wawancara, persepsi, dokumentasi .
3. Triangulasi Waktu, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui prosedur wawancara menjelang awal hari ketika sumbernya masih baru, akan memberikan informasi yang lebih sah sehingga lebih dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Strategi penyelidikan informasi yang digunakan bersifat ilustratif, yaitu mengumpulkan, mengumpulkan dan memahami informasi-informasi yang ada

yang diperoleh secara lengkap dari lapangan, baik informasi yang diperoleh dari pertemuan, dokumentasi atau bahan-bahan lain secara metode.

1. Reduksi kata: proses pengurangan volume atau kompleksitas data dengan tujuan untuk menghasilkan dataset yang lebih kecil, tetapi masih mempertahankan informasi yang penting atau relevan. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data sehingga data lebih mudah dikelola, diproses, atau analisis, tanpa kehilangan makna atau informasi yang signifikan.

2. Penyajian data : proses mengkomunikasikan informasi yang terkandung dalam data dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk mengubah data yang mungkin rumit atau tidak terstruktur menjadi bentuk yang lebih terorganisir, jelas, dan informatif. Ini membantu individu atau organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang data tersebut.

3. Verifikasi : proses pengujian, pemeriksaan, atau konfirmasi terhadap kebenaran atau keabsahan suatu informasi, pernyataan, atau data. Tujuan utama dari verifikasi adalah untuk memastikan bahwa informasi atau data tersebut benar, akurat, dan sesuai dengan standar atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Proses verifikasi biasanya melibatkan Langkah-langkah seperti pengumpulan bukti, pengecekan fakta, atau perbandingan data dengan sumber yang sah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Kota Makassar

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dan merupakan salah satu kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Kota ini memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan di wilayah tersebut. Selain itu, Makassar juga dikenal sebagai kota dengan perkembangan pesat dalam berbagai sektor, termasuk teknologi informasi dan komunikasi.

a. Geografi dan Demografi

- 1) Geografi: Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap ke Selat Makassar. Kota ini memiliki luas sekitar 175,77 km² dengan topografi yang relatif datar di pusat kota dan berbukit di beberapa bagian.
- 2) Demografi: Berdasarkan data BPS, Makassar memiliki populasi yang heterogen dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Penduduk Makassar terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan.

b. Infrastruktur Teknologi dan Informasi

Makassar telah mengadopsi berbagai inisiatif kota cerdas (*smart city*) dengan mengembangkan infrastruktur teknologi yang mumpuni. Beberapa

langkah penting yang diambil oleh pemerintah kota termasuk:

- 1) Pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung layanan digital.
- 2) Implementasi sistem manajemen kota berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
- 3) Pengembangan berbagai aplikasi dan platform digital yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

c. Keunggulan Lokasi

- 1) Pusat Inovasi: Makassar dikenal sebagai salah satu kota yang aktif mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan layanan publik.
- 2) Komitmen Pemerintah: Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan konsep *smart city*, termasuk melalui peluncuran aplikasi Bacce.

d. Tantangan Lokasi

- 1) Kesadaran dan Adopsi Teknologi: Meskipun infrastrukturnya memadai, tingkat kesadaran dan adopsi teknologi di kalangan masyarakat masih bervariasi, yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi *Smart governance*.
- 2) Keterbatasan Data: Mengumpulkan data yang akurat dan representatif dari berbagai sumber dapat menjadi tantangan,

terutama dalam mengakses informasi yang tersebar di berbagai lembaga.

2. Fokus Lokasi Penelitian

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar

DP3A Sebagai instansi yang meluncurkan aplikasi Bacce (Balla Amma Caradde), kantor DPPPA adalah lokasi utama untuk memahami kebijakan dan strategi implementasi aplikasi tersebut.

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Makassar

DISKOMINFO berperan sebagai enabler teknologi yang menyediakan infrastruktur, layanan informasi, dan keamanan data untuk mendukung digitalisasi layanan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi antara kedua lembaga ini memastikan pembangunan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Makassar.

- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memainkan peran penting dalam implementasi *Smart governance* untuk pembangunan inklusif di Kota Makassar. Melalui aplikasi BACCE, UPTD PPA

berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pelaporan kekerasan dan masalah sosial lainnya, yang memungkinkan mereka menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Meskipun aplikasi ini mengalami tantangan teknis dan pemeliharaan, serta rendahnya minat pengguna, UPTD PPA terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi dalam memperluas akses layanan. Kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk sektor swasta melalui MOU, juga menjadi bagian dari strategi untuk memastikan inklusivitas dan dukungan lintas sektor dalam perlindungan anak dan perempuan. Meskipun kolaborasi melalui aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi, UPTD PPA tetap fokus pada pemberdayaan langsung melalui layanan offline. Upaya ini mencerminkan komitmen UPTD PPA dalam mendukung visi *smart city* Makassar yang inklusif, dimana semua warga, termasuk yang rentan, mendapatkan perlindungan dan layanan yang adil serta merata.

B. Hasil Penelitian

Peneliti mengangkat masalah dan menggunakan indikator teori dalam kerangka pikir untuk melakukan penelitian dan menemukan solusi. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan untuk menjawab masalah, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis kualitatif yaitu mengungkapkan fakta-fakta dalam bentuk narasi, akan digunakan untuk menganalisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Smart governance dalam pembangunan Inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui implementasi teknologi digital yang memastikan informasi pemerintah mudah diakses oleh masyarakat. Pendekatan ini mendorong keterbukaan data sehingga warga dapat memantau kinerja pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Selain itu, *Smart governance* mendukung partisipasi masyarakat dengan membangun platform digital yang memungkinkan warga untuk berdiskusi publik, memberikan masukan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memberikan ruang bagi semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dalam hal efisiensi pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi mempercepat dan mempermudah akses layanan publik, seperti perizinan, pengaduan, dan pelayanan kesehatan. Hal ini juga meningkatkan integrasi antar instansi pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih responsif dan efektif. Inklusi sosial merupakan aspek penting dalam pembangunan ini, dengan memastikan bahwa pembangunan kota cerdas memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas bagi semua warga, termasuk transportasi, fasilitas umum, dan layanan digital.

Smart governance juga berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dengan memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam dan

energi secara efisien, mendukung keberlanjutan lingkungan. Sistem pengelolaan limbah dan air yang cerdas juga diimplementasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pendekatan ini mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi dengan membangun ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital, startup, dan bisnis berbasis teknologi. Program pelatihan dan pendidikan teknologi diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat di era digital.

Peningkatan keamanan dan ketertiban juga menjadi tujuan penting, dengan implementasi teknologi pengawasan dan analitik data untuk meningkatkan keamanan kota serta mengembangkan sistem respons cepat untuk situasi darurat dan bencana guna melindungi keselamatan warga. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan peningkatan infrastruktur digital, pengembangan aplikasi dan platform, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, edukasi dan literasi digital, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan kota cerdas.

Dengan pendekatan *Smart governance*, Kota Makassar dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan, menjadikan kota ini sebagai model kota cerdas yang berhasil di Indonesia.

Penulis merumuskan implementasi *Smart governance* dalam pembangunan inklusif kota cerdas di kota makassar yang dapat di lihat dari tiga indikator yaitu ; (1) Transparansi, (2) *E-Participation*, (3) Kolaborasi Publik-Swasta. Adapun pembahasan secara rinci hal tersebut sebagai berikut.

1. Transparansi

Visvizi dan Lytras (2018) dalam buku mereka "Smart Cities: Issues and Challenges" menyatakan bahwa transparansi adalah komponen kunci dalam smart governance yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi yang relevan dengan mudah dan jelas. Transparansi melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan data dan informasi publik secara terbuka. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Transparansi sering kali dihubungkan dengan keterbukaan data pemerintah yang dapat diakses secara online oleh publik, sehingga memungkinkan warga untuk memahami kebijakan dan program pemerintah.

Indikator transparansi memegang peranan krusial dalam *Smart governance*, khususnya dalam pembangunan inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang akurat, dapat diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan transparansi, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, karena masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah bekerja dengan jujur dan akuntabel. Selain itu, transparansi memperkuat akuntabilitas pemerintah dengan memungkinkan publik dan lembaga pengawas lainnya untuk memantau kinerja pejabat publik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Transparansi juga penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Masyarakat dapat menilai dan memberikan umpan balik tentang kualitas layanan yang diterima, mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan

dan menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menyediakan informasi secara transparan, semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi, sehingga mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang diabaikan dalam proses pembangunan kota.

Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, program, dan layanan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan mudah. Melalui aplikasi BACCE, pemerintah Kota Makassar dapat menyediakan informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara online, memungkinkan warga untuk mengunduh dan mengakses informasi tersebut kapan saja dan di mana saja.

Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, memastikan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik. Selain itu, transparansi melalui aplikasi BACCE juga memfasilitasi partisipasi publik. Warga dapat memberikan umpan balik, melaporkan kejadian, dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan dan program yang diimplementasikan.

Dalam konteks aplikasi BACCE, transparansi berarti semua informasi tersedia bagi publik kecuali data pribadi dan sensitif yang dijamin keamanannya. Misalnya, data korban kekerasan atau pelapor yang menggunakan aplikasi BACCE dijaga kerahasiaannya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Namun, informasi umum mengenai layanan dan program dapat diakses

secara luas, memastikan bahwa setiap warga Makassar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah.

Pemerintah Kota Makassar juga menggunakan aplikasi BACCE untuk memperbarui informasi secara real-time, memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru dan akurat. Ini mencakup informasi tentang program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan berbagai layanan sosial lainnya. Melalui transparansi ini, aplikasi BACCE menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Transparansi dalam aplikasi BACCE tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi dan layanan. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Kota Makassar sebagai kota cerdas yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal ini juga untuk mengetahui transparansi terhadap *Smart governance* dalam pembangunan inklusif kota cerdas dibutuhkan ada beberapa pernyataan indikator. Hal yang di sampaikan oleh informan yang berinisial "RM" selaku Tenaga Ahli bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Makassar terkait transparansi dalam *smart governance*

dalam pembangunan inklusif kota cerdas di Kota Makassar adalah sebagai

berikut:

“Ya kita (DISKOMINFO), melalui berita Kota Makassar dengan berbagai macam inovasi dan tentu saja yang didorong oleh seperangkat aturan daerah itu untuk memastikan bahwa itu semua inovasi dan program-program yang berbasis digital dan smart government yang pertama itu berjalan adalah melalui sosialisasi pada media-media publik seperti salah satunya adalah *website*, kemudian selain itu juga melalui sosial media kemudian yang ketiga juga melalui sosialisasi secara langsung oleh DISKOMINFO ke sekolah-sekolah untuk segmen pelajar Ya, jadi ada tiga tadi, pertama melalui media publik seperti *website*, kemudian secara langsung melalui sosial media, kanan-kanan sosial media resmi pemerintah Kota Makassar dan DISKOMINFO, kemudian yang ketiga melalui sosialisasi secara langsung secara langsungnya itu tidak ada yang berkaitan dengan kolaborasi dengan publik swasta seperti LSM, Ingyo. LSM, pernah ada kegiatan, cuman saya lupa namanya, pernah ya saya lupa namanya, coba kita searching karena itu terbuka di semua kegiatan DISKOMINFO, terkait hal-hal tersebut itu terbuka diberitakan, biasanya diberitakan di media publik, di *website*. Kita (DISKOMINFO) melalui kanal-kanal sosial media dan yang utama adalah media *website* resmi Pemerintah Kota Makassar, juga *website* resmi OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Itu mengukur sejauh mana ketersebaran informasi itu melalui tools-tools analitik di *website*, jadi ada toolsnya, jadi kita bisa lihat di *website* itu report atau laporan berapa injejmennya, berapa yang lihat, berapa yang download, berapa yang share Kemudian impresinya juga, kalau di sosial media kan impresinya. Tantangannya adalah, walaupun kami merasa pola penyebaran dan sistem transparansi penyebaran program-program digital Secara umum SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city Ini juga kan di mana kota Makassar itu punya slogan, Sombere dan Smart City Untuk menjaga itu, pemerintahan kota Makassar itu mengupayakan agar informasi terkait hal tersebut Seperti program-program yang ada kaitannya dengan smart city, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu diakses, tetap update di *website-website* dan media-media online Selain itu juga, tantangan yang dihadapi itu, mungkin masalah ketersebaran Karena banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut Walaupun di kota Makassar ini, secara umum, warga kota itu sudah melek teknologi, tetap saja ada di masyarakat kita, masyarakat kota yang kurang mampu mengakses Disebabkan karena keterbatasan fasilitas mereka, kemudian juga disebabkan karena tingkat pendidikan Itu secara umum. Pemerintah kota Makassar melalui dinas komunikasi dan

informatika itu tetap memupayakan Tantangan-tantangan tadi itu bisa kami selesaikan Bisa kami upayakan untuk terselesaikan Di antaranya adalah dengan menggiatkan sosialisasi secara offline di lorong-lorong Yang menjadi sel-sel kota melalui kecamatan maupun kelurahan Melalui SKPD, kelurahan dan kecamatan Penggabai kelurahan itu dibimbing untuk mampu.” (Hasil wawancara: 16 Juli 2024).

DISKOMINFO Kota Makassar memastikan transparansi informasi mengenai kebijakan dan proyek Smart City melalui berbagai saluran komunikasi seperti *website* resmi pemerintah, media sosial, dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Kolaborasi dengan LSM dan sektor swasta juga dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi ini. Semua kegiatan dan program dipublikasikan secara terbuka, memastikan akses informasi yang luas dan terbuka bagi masyarakat.

Untuk mengukur tingkat transparansi, DISKOMINFO menggunakan tools analitik untuk menganalisis data dari *website* dan media sosial. Hal ini meliputi jumlah pengunjung, unduhan, berbagi, serta impresi di media sosial, yang memberikan gambaran tentang efektivitas penyebaran informasi.

Namun, tantangan utama yang dihadapi termasuk keterbatasan akses teknologi, kurangnya fasilitas, dan tingkat pendidikan yang bervariasi. Meskipun banyak warga sudah melek teknologi, ada segmen masyarakat yang belum mampu mengakses informasi digital. DISKOMINFO berupaya mengatasi tantangan ini dengan sosialisasi offline di lorong-lorong kota melalui kecamatan dan kelurahan, serta menyediakan wifi publik untuk meningkatkan akses internet.

Selanjutnya hasil wawancara dari DP3A Kota Makassar berinisial “NS” selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kota Makassar tentang

bagaimana transparansi dalam salah satu inovasi program *Smart governance* yaitu Aplikasi BACCE yang diluncurkan oleh DP3A Kota Makassar :

“Jadi kita DP3A Kota Makassar memastikan transparansi informasi melalui aplikasi BACCE yang merupakan versi online dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Melalui BACCE, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, edukasi, dan layanan konsultasi secara online. Informasi ini dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, menunjukkan komitmen DP3A terhadap transparansi informasi. Fitur-fitur aplikasi tersebut memastikan bahwa informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersedia bagi semua kalangan. Tantangannya pertama adalah Masih banyak warga kita yang tidak mengerti IT Aplikasinya, padahal sudah dibuatkan aplikasi Yang bisa gampang tapi masih ada beberapa Warga kita atau orang yang mengakses layanan Tidak bisa mengerti IT atau mengerti tentang digital. Keberhasilannya itu adalah jumlah masyarakat Yang bisa mengakses aplikasi BACCE Itu tingkat keberhasilannya Pertama jumlah warga yang bisa mengakses aplikasi BACCE Kemudian ukuran berikutnya adalah Jumlah pengaduan atau yang mengakses aplikasi BACCE Yang diselesaikan persolanya”. (Hasil wawancara pada tanggal 11 Juli 2024).

DP3A Kota Makassar memastikan transparansi informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui aplikasi BACCE, yang menyediakan akses online ke informasi, edukasi, dan layanan konsultasi. Informasi ini selalu diperbarui untuk memastikan akurasi dan ketersediaan terkini. Keberhasilan transparansi diukur berdasarkan jumlah pengguna aplikasi dan penyelesaian pengaduan. Tantangan utama adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, namun DP3A berusaha mengatasi ini dengan fitur pengaduan di aplikasi yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik dan melaporkan masalah secara langsung, memastikan partisipasi aktif dalam pengawasan program-program DP3A.

Selanjutnya hasil wawancara dari UPTD PPA Kota Makassar yang berinisial “AS” selaku staff UPTD PPA Kota Makassar tentang bagaimana transparansi dalam salah satu inovasi program *Smart governance* yaitu Aplikasi BACCE sebagai unit pelaksana teknis sebagai penerima laporan dan yang mengakses layanan:

“Tersedia secara transparan ya, buktinya dengan kita bisa di download oleh semua kalangan secara umum melalui Play Store atau APP Store itu kan bukti transparan tapi satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam itu misalkan data korban atau apa itu dijamin 100% akan aman dan tidak akan kami publikasikan ke siapapun tapi kalau transparan untuk men-download aplikasi itu kita sangat transparan, kita bahkan menyuarakan ke setiap kegiatan kami, setiap kejadian DP3A atau setiap pengunjung yang datang di UPTD PPA KOTA MAKASSAR DPP kalau jangan lagi capek-capek kesini kalau kita cuma mau curhat online silahkan download aplikasi Bace dijamin datanya aman 100%.” (Hasil wawancara pada tanggal 25 Juli 2024).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi merupakan salah satu elemen penting yang diupayakan oleh berbagai dinas dan unit di Kota Makassar, termasuk DISKOMINFO, DP3A, dan UPTD PPA. Masing-masing dinas memastikan informasi kebijakan dan programnya dapat diakses secara luas dan transparan oleh masyarakat. DISKOMINFO Kota Makassar memastikan transparansi informasi mengenai kebijakan dan proyek Smart City melalui berbagai saluran komunikasi seperti *website* resmi pemerintah, media sosial, dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Kolaborasi dengan LSM dan sektor swasta juga dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi ini. Untuk mengukur tingkat transparansi, DISKOMINFO menggunakan tools analitik untuk menganalisis data dari *website* dan media sosial, mencakup jumlah pengunjung, unduhan, berbagi, serta impresi di media sosial.

Sementara itu, DP3A Kota Makassar menggunakan aplikasi BACCE untuk memastikan transparansi informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Aplikasi ini menyediakan akses online ke informasi, edukasi, dan layanan konsultasi yang selalu diperbarui untuk memastikan akurasi dan ketersediaan terkini. Keberhasilan transparansi diukur berdasarkan jumlah pengguna aplikasi dan penyelesaian pengaduan. Tantangan utama adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, yang diatasi dengan fitur pengaduan di aplikasi untuk partisipasi aktif dalam pengawasan program-program DP3A.

UPTD PPA Kota Makassar juga memastikan transparansi dengan menyediakan aplikasi BACCE yang dapat diunduh oleh semua kalangan melalui Play Store atau App Store. Aplikasi ini disosialisasikan dalam setiap kegiatan dan kunjungan ke UPTD PPA. Meskipun aksesnya transparan, UPTD PPA menjamin 100% keamanan data pengguna, memastikan bahwa informasi sensitif seperti data korban tidak akan dipublikasikan. Masyarakat didorong untuk menggunakan aplikasi ini untuk konsultasi online, dengan jaminan keamanan data yang ketat.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dengan menyediakan akses informasi yang mudah, menggunakan teknologi digital, dan menjamin keamanan data pengguna, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan.

2. *E-Participation*

E-participation mengacu pada partisipasi warga dalam proses pemerintahan melalui platform digital. Visvizi dan Lytras (2018) menekankan bahwa *e-participation* adalah komponen penting dalam pengembangan *smart cities*. *E-participation* memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara *online*, konsultasi publik, dan diskusi forum digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan warga dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Implementasi *e-participation* memerlukan infrastruktur digital yang baik serta literasi teknologi yang memadai di kalangan masyarakat.

Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa suara dari berbagai segmen masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terwakili, dapat didengar dan dipertimbangkan. Dengan demikian, *E-Participation* membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga, mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi Kota Makassar sebagai kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

E-Participation atau partisipasi elektronik memainkan peran penting dalam *smart governance* untuk pembangunan inklusif kota cerdas di Kota Makassar, terutama melalui inovasi aplikasi BACCE. Aplikasi BACCE, yang merupakan versi online dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), memungkinkan warga untuk terlibat aktif dalam berbagai program pemberdayaan perempuan dan per-

lindungan anak yang dijalankan oleh DP3A Kota Makassar. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi, edukasi, dan layanan konsultasi secara online, serta memberikan umpan balik dan melaporkan masalah secara langsung.

Melalui platform ini, DP3A memastikan bahwa informasi terkait program dan kebijakan dapat diakses secara transparan dan real-time oleh semua kalangan. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah tetapi juga memastikan inklusivitas dengan menjangkau kelompok-kelompok yang mungkin sulit diakses melalui metode konvensional. Penggunaan aplikasi BACCE juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program-program pemerintah, karena mereka dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, inovasi *Smart governance* melalui aplikasi BACCE membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga, mendukung kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi Kota Makassar sebagai kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

E-Participation sangat penting dipastikan memungkinkan warga untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Melalui platform online dan aplikasi, masyarakat dapat memberikan masukan. Sesuai dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dimana informan yang berinisial “RM” Staff Tenaga Ahli bidang Aptika DISKOMINFO, berikut adalah hasil wawancara terkait *E-Participation*:

“Memastikan partisipatif ya, memastikan bahwa semua informasi itu bisa diakses oleh semua kalangan Seperti tadi, pemerintah kota berupaya masuk ke semua segmentasi media publik Apakah melalui media online, *website*, sosial media, maupun offline Seperti tadi, yang menjadi tantangan juga tadi Seperti kalangan-kalangan warga kota yang memiliki akses terbatas Karena mereka tidak memiliki akses internet Kalau yang tidak memiliki akses internet, pemerintah kota menyediakan wifi publik Kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik itu, *Smart governance* khususnya yang terkait dengan pelayanan masyarakat Saat ini melalui inovasi yang sangat banyak, itu bisa diakses oleh semua kalangan Karena sistemnya online Seperti pelayanan-pelayanan yang ada di Dukcapil seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan karena di online. Pemerintah kota itu memastikan betul dan berupaya betul bahwa seluruh warga kota di semua kalangan Itu bisa menikmati layanan pemerintah melalui jalur-jalur tadi, melalui inovasi-inovasi yang banyak, yang di gagas oleh berbagai SKPD, inovasi -inovasi yang bersifat pelayanan publik.Jadi semua kalangan. Kemudian juga inklusivitas dari sisi misalnya kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, disabilitas, itu pemerintah kota melalui inovasi-inovasi itu memastikan bahwa semua sistem pelayanan itu bisa diakses oleh seluruh kalangan, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Saya kasih contoh ya, misalnya *website* pemerintah kota Makassar, itu kita punya tools accessibility yang bisa untuk semua kalangan, termasuk disabilitas. Jadi ada voice over-nya, ada di *website* kota itu, pemerintah kota, makassarkota.gov .id itu bisa diakses oleh orang saudara-saudara kita yang buta dengan voice over dengan suara tulangitira, yang tunarungu, dan buta warna, dan seterusnya itu bisa diakses. Ada kalau kita lihat di ujung kiri tengah, ada floating point disitu, ada menu, itu accessibility, bisa diakses oleh semua kalangan termasuk, sudah-sudah kita yang disabilitas”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juli 2024).

DISKOMINFO Kota Makassar memastikan partisipasi semua kalangan dalam akses informasi dengan memanfaatkan berbagai media publik, baik online maupun offline. Pemerintah kota berupaya menjangkau semua segmentasi masyarakat melalui *website*, media sosial, dan penyediaan wifi publik bagi mereka yang tidak memiliki akses internet. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau *smart governance*, memastikan bahwa layanan publik, seperti

pelayanan di Dukcapil, dapat diakses secara online oleh semua kalangan. Pemerintah kota juga mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik melalui SKPD untuk memastikan inklusivitas, termasuk bagi masyarakat dengan keterbatasan fisik atau disabilitas. *Website* pemerintah kota Makassar dilengkapi dengan alat bantu aksesibilitas seperti voice-over untuk tunanetra dan fitur lain yang mendukung pengguna dengan disabilitas. Semua upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk memastikan bahwa layanan dan informasi pemerintah dapat diakses oleh seluruh warga kota, tanpa terkecuali.

Adapun hasil wawancara dari DP3A Kota Makassar, dengan informan berinisial “NS” selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kota Makassar tentang bagaimana *E-Participation* dalam *Smart governance* dengan inovasi program Aplikasi BACCE.

“Kalau pemanfaatan aplikasi BACCE itu Untuk meningkatkan participasi perempuan Tentu ada hubungannya Kalau anak-anak terutama Anak-anak itu Diharapkan dia bisa menjadi pelapor dan pelopor 2P Agen 2P Pelapor dan pelopor Pelopor, apabila terjadi kerasan Atau jadi bullying jantur mereka Ataupun apapun yang tidak mengenakan Bisa dilapor ke situ Menjadi pelopor Itu artinya dia menjadi agen pelopor Agen yang bisa melurukan kebaikan Kepada anak-anak yang lain Karena biasanya anak-anak itu lebih menerima Pendapat, saran dari teman sebaya mereka Ya tak? Daripada orang tua yang aneh Lebih bagus kalau temannya bicara Dia lebih mendapatkan daripada orang tua Itu meningkatkan participasi lewat itu. Aplikasi BACCE ini Tentu mendukung dari efektifnya Partisipasi perempuan dan anak Ya tau? Kenapa? Karena mereka tidak perlu berita muka Kemudian ini juga aplikasinya Hanya membutuhkan data Data internet sudah bisa berpartisipasi Dalam pemadain perempuan apapun perlindungan anak Kalau anak itu kan sebagai agen pelapor Mengerti maksud saya? Ini tentu inklusi Inklusi Inklusi Ini tentu inklusi Kenapa? Karena kita sudah program Yang harus kita itu GDC Gender, Disabilitas Termasuk dibilangnya inklusi Mesti semua mendapatkan Pembangunan secara merata Hasil pembangunan secara merata Mereka bukan perempuan dan anak Apapun disabilitas Bukan hanya sebagai objek Tapi sebagai subjek

di sini Jadi DP3A KOTA MAKASSARitu memastikan Isu inklusi ini Bisa di semua program dan kegiatannya Dimasukkan dengan isu inklusi Tidak memandang siapa dia, Dimana dia, apa dia, bagaimana dia. Hambatannya itu adalah Masih banyak masyarakat kita Yang tidak mengerti ini Hambatannya itu tadi Kalau Anda tidak bisa menggunakan Amplis kebaca silahkan datang ke Pispaga secara offline Disana tim kami bisa menyambut Bapak-apak dan ibu-ibu Dalam mengadukan persoalannya Ataupun apapun dia meminta layanan. (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024).

DP3A Kota Makassar memanfaatkan aplikasi BACCE untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan anak-anak dalam pemberdayaan dan perlindungan mereka. Aplikasi ini memungkinkan anak-anak untuk menjadi agen pelapor dan pelopor, melaporkan insiden seperti kekerasan atau bullying, serta menyebarkan pesan-pesan positif di antara teman sebaya mereka. Aplikasi ini mendukung partisipasi efektif karena pengguna hanya membutuhkan akses internet untuk berkontribusi tanpa perlu bertatap muka. DP3A memastikan inklusi dalam setiap program dan kegiatan, memperhatikan aspek gender, disabilitas, dan memastikan semua kelompok mendapat manfaat dari pembangunan secara merata. Tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi ini. Untuk mengatasi hambatan ini, DP3A juga menyediakan layanan offline di Puspaga bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan aplikasi BACCE.

Adapun hasil wawancara informan dari UPTD PPA yang berinisial “AS” selaku Staf UPTD PPA Kota Makassar tentang bagaimana unit pelaksana *Smart governance* dengan inovasi program Aplikasi BACCE terkait *E-Participation*:

“Tidak terlalu tertarik mungkin orang untuk download, mereka lebih senang kalau mereka datang langsung mereka lebih senang kalau

mereka datang langsung, karena saya pikir dengan kita mengadakan sosialisasi sudah banyak anak-anak muda yang berpikir positif bahwa ayo deh kita lebih baik ke sana saja curhat langsung dibandingkan curhat dalat online. Karena program Aplikasi Bacce ini berbasis jaringan apa segala macam hambatannya yang itu *maintenance* terkadang jaringannya aplikasinya *maintenance* keysetting atau aplikasinya error lagi itu yang terkadang yang membuat kami kesulitan hambatan-hambatannya itu di situ. Untuk sampai saat ini itu kami kan butuh bantuan dari teman-teman dari DINAS juga untuk mereka mensosialisasikan di setiap kegiatan DINAS Pemerintah Perempuan kalau untuk sampai saat ini itu peminatnya sudah menurut kami masih kurang untuk saat ini karena yang mengakses itu baru sekitar 5-10 orang saja untuk mengakses tapi untuk lebih jelasnya sebenarnya mungkin sekarang jauh lebih banyak cuman untuk aplikasinya itu kita tidak bisa mengakses karena dia lagi sementara *maintenance* mungkin sudah lebih banyak karena kan setiap hari sampai kini lakukan sosialisasi kegiatan tentang juga aplikasi Bace itu jadi kalau untuk sekarang saya tidak bisa pergi dulu menarik data karena lagi proses *maintenance*.

Saran dari pengguna aplikasi tersebut dia memberikan komentarnya di situ kami pasti mempertimbangkan solusi-solusi yang diberikan oleh pengguna-pengguna aplikasi tersebut maksudnya dia mungkin ada saran dan kesannya mungkin sarannya lebih ditingkatkan lagi atau mungkin sarannya semacam lebih ditingkatkan atau performanya untuk menjawab keluhannya masyarakat lebih segera seperti itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 25 Juli 2024).

UPTD PPA Kota Makassar mengidentifikasi beberapa tantangan dan respons terhadap *E-Participation* melalui aplikasi BACCE. Masyarakat lebih cenderung untuk datang langsung ke kantor daripada menggunakan aplikasi online untuk konsultasi. Hambatan utama termasuk masalah jaringan dan pemeliharaan aplikasi yang sering mengalami kendala teknis. Upaya sosialisasi oleh DINAS untuk meningkatkan penggunaan aplikasi ini belum sepenuhnya berhasil, dengan hanya 5-10 orang yang mengakses aplikasi secara rutin. Namun, jumlah pengguna mungkin lebih tinggi karena data tidak dapat diakses selama pemeliharaan aplikasi. UPTD PPA juga memperhatikan saran dan komentar dari

pengguna aplikasi untuk meningkatkan performa dan respons terhadap keluhan masyarakat, menunjukkan komitmen mereka untuk terus memperbaiki layanan digital ini.

Hasil wawancara dengan DISKOMINFO, DP3A, dan UPTD PPA menunjukkan upaya terkoordinasi dalam memajukan *Smart governance* dan inklusi melalui aplikasi BACCE di Kota Makassar. DISKOMINFO berfokus pada memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi melalui berbagai saluran media, baik online maupun offline, serta mengatasi tantangan akses internet dengan menyediakan wifi publik. Sementara itu, DP3A menggunakan aplikasi BACCE untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan anak, dengan harapan anak-anak bisa berfungsi sebagai pelapor dan pelopor dalam isu-isu kekerasan atau bullying, serta mempromosikan inklusi gender dan disabilitas. Meski ada hambatan dalam adopsi aplikasi seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan masalah teknis, DP3A berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi melalui edukasi dan fitur inklusif dalam programnya. UPTD PPA mengidentifikasi ketertarikan yang rendah terhadap aplikasi BACCE, terutama karena preferensi masyarakat untuk interaksi langsung dan kendala teknis yang mempengaruhi kinerja aplikasi. Mereka juga menyadari pentingnya sosialisasi dan feedback dari pengguna untuk perbaikan aplikasi, meskipun akses data saat ini terbatas karena masalah *maintenance*. Semua instansi ini bekerja bersama untuk meningkatkan inklusi dan partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada.

3. Kolaborasi Publik-Swasta

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta adalah penting untuk keberhasilan implementasi *smart cities*. Menurut Visvizi dan Lytras (2018), kolaborasi ini membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang mungkin dihadapi oleh pemerintah. Melalui kemitraan ini, pemerintah dapat memanfaatkan inovasi dan efisiensi yang ditawarkan oleh sektor swasta untuk meningkatkan layanan publik. Kolaborasi publik-swasta mencakup berbagai bentuk kemitraan, termasuk pengembangan teknologi bersama, proyek infrastruktur, dan penyediaan layanan yang mendukung program *smart cities*. Model kolaborasi ini memperkuat kapabilitas pemerintah dan mendorong inovasi melalui integrasi teknologi dan ide-ide baru dari sektor swasta.

Kolaborasi publik-swasta juga memainkan peran krusial dalam *Smart governance* dan pembangunan inklusif kota cerdas di Kota Makassar. Kemitraan antara sektor publik dan swasta tidak hanya memperluas sumber daya dan keahlian yang tersedia tetapi juga meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam penerapan teknologi cerdas. Melalui kolaborasi ini, pemerintah kota dapat memanfaatkan investasi dan teknologi terbaru dari sektor swasta, sementara sektor swasta mendapatkan dukungan dan legitimasi dari pemerintah. Ini memungkinkan pengembangan infrastruktur pintar yang lebih cepat dan lebih efektif, seperti sistem transportasi yang terintegrasi, layanan kesehatan yang lebih baik, dan solusi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, kolaborasi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan sektor swasta, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-

proyek yang dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena sektor swasta sering kali membawa standar tinggi dalam hal manajemen proyek dan pelaporan.

Di Kota Makassar, kemitraan publik-swasta berpotensi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan besar seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan teknis yang kompleks. Kolaborasi ini membantu menciptakan solusi yang lebih inovatif dan inklusif, memastikan bahwa manfaat dari pembangunan kota cerdas dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi publik-swasta tidak hanya mempercepat perkembangan kota tetapi juga memastikan bahwa transformasi tersebut inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi publik-swasta memainkan peran krusial dalam *smart governance* dan pembangunan inklusif kota cerdas di Kota Makassar, terutama dalam konteks program inovasi seperti aplikasi BACCE. Melalui kolaborasi ini, pemerintah kota dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan aplikasi BACCE, yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dapat berfungsi dengan optimal.

Secara keseluruhan, kemitraan antara publik dan swasta dalam *smart governance* melalui aplikasi BACCE memungkinkan Kota Makassar untuk mengimplementasikan solusi digital yang lebih baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa program-program penting mencapai target yang lebih luas dan inklusif.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial “RM” selaku Tenaga Ahli bidang Aptika DISKOMINFO Kota Makassar mengenai kolaborasi public-swasta dalam *smart governance* dalam Pembangunan inklusif kota cerdas di Kota Makassar:

“Mengadakan ke kolaborasi sama pihak swasta biasanya sosialisasi. Tantangannya itu ya, kita harus, karena kan biasanya pihak swasta itu ada kepentingannya, sementara pemerintah kota makassar juga ada kepentingannya. Nah ini masalah self-interest, masalah kepentingan ini, ini yang mau disatukan, itu yang mungkin jadi tantangan. Siapa tahu, pihak swasta itu maunya begini, sementara pemerintah kota itu sedang mencanangkan program begini, jadi biasanya masalah kepentingan. Nah itu yang berusaha disatukan oleh pemerintah kota makassar. Memastikan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta meningkatkan kualitas layanan public, ya itu tadi, kita pastikan bahwa support, dukungan dari pihak swasta itu, itu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kota yang berbasis pelayanan. Berbasis pelayanan yang sepuluh hati kepada masyarakat. Ini tadi yang saya maksudkan, ini floating point. Ini untuk inklusivitas. Terangkan lagar, negative contrast, naikkan. Ada voiceover juga. Mengukur dampak kolaborasi itu jadi secara umum, kita ada di seluruh pemerintah semua lapisan. Itu ada penilaian dari pemerintah pusat namanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, disitulah cara kita mengukur. Jadi itu kita di assessment, di nilai, di nilai sama pemerintah pusat. Terkait kebijakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik itu tadi. Apakah nilainya bagus? Nilainya itu mulai satu sampai lima. Kalau lima tertinggi lima, terendah nilai satu. Kemudian sama juga, demikian juga dengan smart city. Smart city ada indexnya juga. Ada penilaiannya dari pemerintah pusat. Jadi mungkin cara kita, cara pemerintah kota Makassar dan pemerintah kota lainnya dalam mengukur kemajuan progress kebijakan yang berbasis system pemerintahan berbasis elektronik dan smart city itu berjalan. Memastikan kolaborasi dengan pihak swasta berjalan efektif dan transparan dengan memastikan bahwa program itu betul-betul sinergi. Sinergi untuk satu tujuan, yaitu pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat. Dengan cara berkoordinasi serius dengan pihak swasta. Kemudian memastikan juga bahwa kepentingan swasta itu harus sejalan dengan kepentingan pemerintah kota Makassar.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Juli 2024).

kolaborasi publik-swasta menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar menghadapi tantangan dalam menyatukan kepentingan yang seringkali berbeda antara sektor publik dan swasta. Tantangan utama adalah menyelaraskan tujuan dan kepentingan kedua belah pihak untuk mencapai sinergi yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah kota berupaya memastikan bahwa dukungan dari pihak swasta sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pelayanan masyarakat yang berkualitas. Untuk mengukur dampak kolaborasi ini, pemerintah menggunakan penilaian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan indeks smart city yang dinilai oleh pemerintah pusat, dengan skor yang mencerminkan kemajuan dan efektivitas program. Transparansi dan efektivitas kolaborasi dijaga melalui koordinasi yang serius dengan pihak swasta, memastikan bahwa semua program dan inisiatif selaras dengan kepentingan dan tujuan bersama untuk pelayanan publik yang optimal.

Adapun hasil wawancara dengan Nanin Sudiar Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kota Makassar mengenai kolaborasi public-swasta dalam *Smart governance* Pembangunan inklusif kota cerdas di kota makassar dengan program Aplikasi BACCE:

“Kalau kolaborasi public swasta ini Kami sudah melakukan berbagai macam MOU Untuk perempuan dan perlindungan anak MOU yang penuh Sesampaikan pertama disini Adalah MOU dengan PHRI Persatuan Hotel Restoran Indonesia PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia Dalamnya ada beberapa Restoran-Restoran Kami disitu khusus untuk Perlindungan anaknya Supaya menekan yang namanya Peredaran perdayaan anak Perdayaan anak Kemudian eksplogi seksual terhadap anak Biasanya kan banyak yang terjadi di hotel-hotel Makanya meski ada MOU untuk kerjasama Antara kita, DP3A KOTA MAKASSAR, Pemerintah Kota Makassar Dengan PHRI untuk menguasai hal tersebut Ada juga beberapa MOU yang kami lakukan

Dengan beberapa institusi AKM Dibisi seperti UNM UNM ya UNM dengan UNHAS UNM itu berkaitan dengan psikolog yang magang di empat kita Kalau SOSTA berikutnya itu Kami ada namanya Upside Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Ada berapa perusahaan dilan situ Gini itu Kita pastikan bahwa Kolaborasi antara publik, swasta, pemerintah dan publik dan swasta itu Bisa memberikan sumbangan perhatiannya Terhadap perempuan sampai perempuan anak Jadi kalau saya kira Kalau kemitraan di sektor swasta Mendukung program-program melalui aplikasi BACE Saya kira belum ya Belum ini sektor swasta dan BACE itu Ini masih antara Antara pengguna layanan dengan kami langsung Daerah antara pengguna layanan Dengan kami langsung pemberi layanan Kalau kemitraan sektor swasta itu Masih diluar lingkungan BACE Masih kami offline Begitu Begitu Ini masih di dalamnya Sesuai dengan fitur itu ada Aplikasi tentang pengaduan Tentang pengaduan Tentang konsultasi Tentang informasi-informasi penting Yang kami lakukan berulang-ulang di sektor swasta Tapi tentang Kondisinya dengan sektor swasta Melalui aplikasi BACE itu belum Ya Tapi kalau kolaborasi antara Pemerintah swasta dengan ini sudah ada cuma dimasukkan dalam aplikasi BACE itu belum Belum diperkenalkan Ini masih di direct antara Pengguna layanan dengan kami yang pemberi layanan. Tantangan yang dihadapi dalam berkolaborasi dengan sektor swasta adalah pihak swasta terkadang belum mengerti tentang isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta isu pengarusutamaan gender maupun isu inklusif dalam hal ini GEDSI. Kemudian tantangan berikutnya adalah masih kurangnya swasta yang mau atau tertarik untuk berkolaborasi dalam menangani isu tersebut di atas. Upaya yang dilakukan adalah melakukan audince dengan pihak swasta untuk memberikan pemahaman dan pengertian bahwa isu tersebut diatas sangat penting untuk di intervensi oleh pihak swasta karena kalo pemerintah sendiri yang bergerak tidak akan maksimal hasilnya harus didukung oleh lintas sektor termasuk pihak swasta Pelibatan sektor swasta melalui aplikasi bacce belum dilakukan, untuk sementara ini aplikasi bacce di akses direct antara masyarakat yang akan dilayani dengan layanan sesuai fitur di aplikasi seperti fitur konsultasi ataupun pengaduan.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Juli 2024).

Kolaborasi antara publik dan swasta di Kota Makassar menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak, yang seringkali memerlukan penyatuan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah kota Makassar berupaya memastikan bahwa dukungan dari sektor swasta selaras dengan kebijakan pelayanan masyarakat, menggunakan penilaian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

dan indeks smart city untuk mengukur dampak kolaborasi tersebut. Meskipun ada berbagai MoU antara pemerintah dan sektor swasta, seperti dengan PHRI untuk perlindungan anak dan kerja sama dengan institusi pendidikan seperti UNM dan UNHAS, kolaborasi ini belum sepenuhnya diintegrasikan dalam aplikasi BACCE. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman dari pihak swasta mengenai isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keterbatasan minat mereka untuk berkolaborasi dalam isu-isu tersebut. Upaya yang dilakukan termasuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya intervensi lintas sektor. Saat ini, aplikasi BACCE lebih fokus pada interaksi langsung antara masyarakat dan layanan tanpa melibatkan sektor swasta dalam prosesnya.

C. Pembahasan

Hasil wawancara di Kota Makassar mengungkap tiga aspek utama dalam penerapan *smart governance* yang mencerminkan keterkaitan antara teori dan praktik di lapangan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan DISKOMINFO, DP3A, dan UPTD PPA Kota Makassar, teori *smart governance* yang dapat digambarkan mencakup tiga aspek kunci yang saling terkait dalam konteks pembangunan inklusif kota cerdas:

1. Transparansi

Transparansi merupakan elemen penting dalam smart governance, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai dinas di Kota Makassar, termasuk DISKOMIN-

FO, DP3A, dan UPTD PPA. Penerapan transparansi di Kota Makassar sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Visvizi dan Lytras (2018) dalam buku *Smart Cities: Issues and Challenges*, di mana mereka menegaskan bahwa transparansi adalah fondasi utama dari smart governance. Masing-masing dinas memastikan informasi kebijakan dan programnya dapat diakses secara luas dan transparan oleh masyarakat.

DISKOMINFO Kota Makassar memastikan transparansi informasi mengenai kebijakan dan proyek *smart city* melalui berbagai saluran komunikasi seperti *website* resmi pemerintah, media sosial, dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Kolaborasi dengan LSM dan sektor swasta juga dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi ini. Untuk mengukur tingkat transparansi, DISKOMINFO menggunakan tools analitik untuk menganalisis data dari *website* dan media sosial, mencakup jumlah pengunjung, unduhan, berbagi, serta impresi di media sosial.



Gambar 4.1 Inisiatif DP3A Kota Makassar memastikan transparansi informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Aplikasi BACCE.

Sumber: Aplikasi BACCE

DP3A Kota Makassar menggunakan aplikasi BACCE untuk memastikan transparansi informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Aplikasi ini menyediakan akses online ke informasi, edukasi, dan layanan konsultasi yang selalu diperbarui untuk memastikan akurasi dan ketersediaan terkini. Keberhasilan transparansi diukur berdasarkan jumlah pengguna aplikasi dan penyelesaian pengaduan.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	413
2	2022	1.669
3	2023	634

Tabel 4.1 Rekap kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di kota makassar tahun 2021-2023

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar

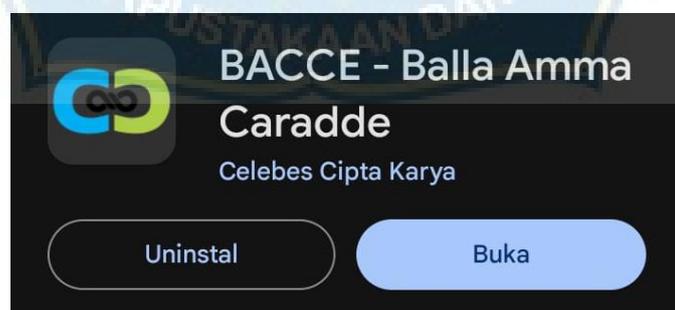
Transparansi, menurut teori yang dijelaskan oleh Visvizi dan Lytras (2018) dalam "*Smart Cities: Issues and Challenges*," adalah salah satu elemen kunci dalam pembangunan kota cerdas. Transparansi ini mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh publik, yang merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga.

Dengan mempublikasikan data seperti jumlah kasus kekerasan yang terjadi setiap tahun, pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya untuk bersikap terbuka mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Langkah ini sejalan dengan teori Visvizi dan Lytras yang menekankan bahwa transparansi tidak hanya

meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan dan dalam menciptakan solusi kolektif untuk tantangan perkotaan.

Lebih jauh lagi, ketersediaan data ini juga bisa mendorong e-participation, suatu aspek yang juga dibahas oleh Visvizi dan Lytras sebagai bagian integral dari *smart governance*. Dengan informasi yang transparan, masyarakat lebih mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara digital, memberikan umpan balik yang berinformasi, dan ikut serta dalam perancangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks ini, transparansi data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil, serta memperbaiki layanan publik yang ada.

Tantangan utama adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, yang diatasi dengan fitur pen-gaduan di aplikasi untuk partisipasi aktif dalam pengawasan program-program DP3A.



Gambar 4.2 Inisiatif UPTD PPA Kota Makassar memastikan transparansi dengan menyediakan aplikasi BACCE yang dapat diunduh oleh semua kalangan melalui *Play Store* atau *App Store*.

Sumber: *PlayStore*

UPTD PPA Kota Makassar juga memastikan transparansi dengan menyediakan aplikasi BACCE yang dapat diunduh oleh semua kalangan melalui *Play Store* atau *App Store*. Aplikasi ini disosialisasikan dalam setiap kegiatan dan kunjungan ke UPTD PPA. Meskipun aksesnya transparan, UPTD PPA menjamin 100% keamanan data pengguna, memastikan bahwa informasi sensitif seperti data korban tidak akan dipublikasikan. Masyarakat didorong untuk menggunakan aplikasi ini untuk konsultasi online, dengan jaminan keamanan data yang ketat.

Di Kota Makassar, transparansi diterapkan melalui berbagai inisiatif digital, seperti penggunaan aplikasi BACCE oleh DP3A dan UPTD PPA untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DISKOMINFO juga mendukung transparansi dengan menyediakan informasi mengenai kebijakan *Smart City* melalui *website* resmi, media sosial, dan sosialisasi langsung. Usaha-usaha ini menggambarkan bagaimana TIK digunakan untuk memfasilitasi akses informasi secara luas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah.

Pendekatan ini sangat selaras dengan teori Visvizi dan Lytras yang menekankan pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas, serta dalam memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi terkait kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, praktik transparansi di Kota Makassar tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip smart governance,

tetapi juga memperkuat posisi pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dengan menyediakan akses informasi yang mudah, menggunakan teknologi digital, dan menjamin keamanan data pengguna, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan.

2. *E-Participation*

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana *e-participation* (partisipasi elektronik) diterapkan untuk memajukan smart governance dan inklusi melalui aplikasi BACCE. Inisiatif ini sejalan dengan teori *e-participation* yang diuraikan oleh Visvizi dan Lytras (2018) dalam buku *Smart Cities: Issues and Challenges*. Mereka mendefinisikan *e-participation* sebagai penggunaan teknologi digital untuk memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan. *E-participation* adalah elemen kunci dalam *smart governance*, di mana keterlibatan warga melalui platform digital dapat memperkuat transparansi, inklusi, dan akuntabilitas pemerintah.

DISKOMINFO, DP3A, dan UPTD PPA menunjukkan upaya terkoordinasi dalam memajukan *smart governance* dan inklusi melalui aplikasi BACCE di Kota Makassar. DISKOMINFO berfokus pada memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi melalui berbagai saluran media, baik online maupun offline, serta mengatasi tantangan akses internet dengan menyediakan wifi publik.

DISKOMINFO juga mendukung *e-participation* dengan memastikan akses informasi yang luas melalui berbagai saluran media, termasuk media online dan offline, serta penyediaan wifi publik untuk mengatasi hambatan akses internet. Upaya ini sejalan dengan konsep *e-participation* yang ditekankan oleh Visvizi dan Lytras, di mana teknologi digunakan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pemerintahan.



Gambar 4.3 Upaya DP3A Kota Makassar dan UPTD PPA Kota Makassar dalam meningkatkan *E-Participation* perempuan dan anak melalui Aplikasi Bacce.

Sumber: Aplikasi Bacce

Sementara itu, DP3A menggunakan aplikasi BACCE untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan anak, dengan harapan anak-anak bisa berfungsi sebagai pelapor dan pelopor dalam isu-isu kekerasan atau bullying, serta mempromosikan inklusi gender dan disabilitas. Meski ada hambatan dalam adopsi aplikasi seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan masalah teknis, DP3A berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi melalui edukasi dan fitur inklusif dalam programnya. UPTD PPA mengidentifikasi ketertarikan yang rendah terhadap aplikasi BACCE, terutama karena preferensi masyarakat untuk interaksi langsung dan kendala teknis yang mempengaruhi kinerja aplikasi. Mereka juga menyadari pentingnya sosialisasi dan feedback dari pengguna untuk perbaikan aplikasi, meskipun akses data saat ini terbatas karena masalah *maintenance*. Semua instansi ini beker-

ja bersama untuk meningkatkan inklusi dan partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada.

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2021	413
2	2022	1.669
3	2023	634

Tabel 4.2 Rekap laporan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di kota makassar tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel tersebut yang menampilkan rekap kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dalam jumlah kasus yang ditangani, namun juga mengungkapkan bahwa implementasi aplikasi Bacce sebagai bagian dari inisiatif *e-participation* belum sepenuhnya berhasil. Dengan hanya 5-10 orang yang secara rutin mengakses aplikasi tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan melalui platform digital ini masih sangat terbatas.

Menurut teori yang diuraikan oleh Visvizi dan Lytras (2018) dalam "*Smart Cities: Issues and Challenges*," *e-participation* merupakan komponen penting dari smart governance yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui teknologi digital. *E-participation* memungkinkan warga untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, memberikan umpan balik, dan berkontribusi dalam solusi untuk tantangan perkotaan. Namun, keberhasilan *e-participation* sangat

bergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk literasi digital, akses yang luas terhadap teknologi, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.

Dalam kasus aplikasi Bacce, meskipun telah dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan kasus kekerasan, jumlah pengguna yang rendah menunjukkan adanya hambatan dalam penerapannya. Hal ini mungkin terkait dengan tingkat literasi digital yang belum merata di kalangan Masyarakat dan preferensi masyarakat untuk menggunakan saluran tradisional seperti pelaporan langsung.

Visvizi dan Lytras menekankan bahwa untuk mencapai partisipasi yang efektif dalam kota cerdas, pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi yang diterapkan benar-benar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Aplikasi seperti Bacce, meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan *e-participation*, memerlukan dukungan tambahan dalam bentuk edukasi digital, peningkatan kesadaran, serta upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem tersebut. Tanpa elemen-elemen ini, inisiatif *e-participation* mungkin tidak mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu keterlibatan aktif dan inklusif dari masyarakat dalam proses *governance*, khususnya dalam menangani isu-isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, tabel yang menunjukkan jumlah kasus kekerasan ini bukan hanya indikator tantangan yang dihadapi, tetapi juga refleksi dari kebutuhan untuk mengoptimalkan pendekatan *e-participation* yang lebih inklusif dan

efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori *smart governance* oleh Visvizi dan Lytras.

Di Kota Makassar, aplikasi BACCE yang dikembangkan oleh DP3A dan UPTD PPA mencerminkan implementasi *e-participation* dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam isu-isu penting seperti kekerasan dan bullying. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan kendala teknis, komitmen untuk meningkatkan partisipasi melalui edukasi dan fitur inklusif menunjukkan bagaimana teknologi dapat berperan dalam menciptakan keterlibatan yang lebih luas dan inklusif.

Dengan demikian, inisiatif di Kota Makassar tidak hanya mendukung teori *e-participation* dari Visvizi dan Lytras, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks lokal untuk mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif dan efektif melalui penggunaan teknologi digital.

3. Kolaborasi publik-swasta

Kolaborasi publik-swasta di Kota Makassar menghadapi tantangan signifikan dalam menyelaraskan kepentingan yang berbeda antara sektor publik dan swasta, yang seringkali memerlukan penyatuan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut teori Visvizi dan Lytras (2018) dalam buku *Smart Cities: Issues and Challenges*, indikator keberhasilan kolaborasi publik-swasta melibatkan kesesuaian tujuan, komunikasi efektif, pengukuran dan evaluasi,

keterlibatan dan komitmen, serta inovasi dan adaptasi. Di Makassar, keselarasan tujuan antara sektor swasta dan kebijakan publik, seperti dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, belum sepenuhnya terwujud, menunjukkan perlunya penyatuan tujuan yang lebih mendalam. Kurangnya pemahaman dari pihak swasta mengenai isu-isu sosial, seperti yang terlihat dalam keterbatasan minat mereka untuk berkolaborasi dalam isu tersebut, mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi yang perlu diatasi melalui sosialisasi dan peningkatan pemahaman. Pemerintah kota Makassar menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan indeks smart city untuk mengukur dampak kolaborasi, tetapi aplikasi BACCE yang lebih fokus pada interaksi masyarakat tanpa melibatkan sektor swasta menunjukkan bahwa evaluasi dampak kolaborasi mungkin belum sepenuhnya terintegrasi. Untuk mencapai keterlibatan dan komitmen yang lebih baik, serta memastikan inovasi dan adaptasi yang efektif, strategi yang sesuai dengan indikator Visvizi dan Lytras perlu diterapkan, dengan perhatian khusus pada tantangan spesifik yang dihadapi dalam konteks lokal.

Temuan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara teori *smart governance* yang diusulkan oleh Visvizi dan Lytras dengan praktik yang diterapkan di Kota Makassar. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Makassar tidak hanya berusaha untuk mengadopsi prinsip-prinsip teoritis *smart governance*, tetapi juga menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan lokal untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, teori *smart governance* yang tercermin dari penelitian ini menggambarkan upaya Kota Makassar untuk mengintegrasikan transparansi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dengan fokus pada inklusi dan penyesuaian kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan kota cerdas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penerapan smart governance di Kota Makassar melalui Aplikasi Bacce menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, e-participation, dan kolaborasi publik-swasta. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Visvizi dan Lytras (2018) dalam buku mereka *Smart Cities: Issues and Challenges*. Menurut Visvizi dan Lytras, smart cities berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi dengan menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Dari segi transparansi, Visvizi dan Lytras (2018) dalam buku *Smart Cities: Issues and Challenges* menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan *smart cities* adalah akses informasi yang terbuka dan transparan. Penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut dengan menunjukkan bahwa dinas-dinas di Makassar, seperti DISKOMINFO, DP3A, dan UPTD PPA, telah memanfaatkan aplikasi Bacce untuk menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, mereka juga mencatat tantangan dalam literasi teknologi yang rendah, yang sejalan dengan tantangan yang diidentifikasi oleh Visvizi dan Lytras terkait dengan kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi.

Dalam hal *e-participation*, Aplikasi BACCE telah digunakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam isu-isu kekerasan dan bully-

ing, serta mempromosikan inklusi gender dan disabilitas, mencerminkan pendekatan inklusif yang dibahas oleh Visvizi dan Lytras. Mereka menggarisbawahi bahwa *e-participation* adalah elemen krusial dalam *smart governance*. Meskipun terdapat hambatan teknis dan pemahaman teknologi yang terbatas, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terus dilakukan melalui edukasi dan fitur inklusif dalam aplikasi. Namun, keterbatasan teknis dan preferensi masyarakat untuk interaksi langsung menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta di Kota Makassar menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut teori Visvizi dan Lytras (2018) dalam buku *Smart Cities: Issues and Challenges*, indikator keberhasilan kolaborasi publik-swasta melibatkan kesesuaian tujuan, komunikasi efektif, pengukuran dan evaluasi, keterlibatan dan komitmen, serta inovasi dan adaptasi. Meskipun ada berbagai nota kesepahaman dengan sektor swasta, integrasi mereka dalam aplikasi BACCE masih terbatas. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman dan minat dari sektor swasta terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *smart governance* melalui Aplikasi Bacce di Kota Makassar telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, meskipun tan-

tangan dalam kolaborasi publik-swasta masih perlu diatasi untuk mencapai pembangunan kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. **Peningkatan Literasi Teknologi:** Perlu dilakukan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi teknologi masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan aplikasi BACCE dan layanan digital lainnya dengan lebih efektif.
2. **Pengembangan Infrastruktur Teknologi:** Meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet dan perangkat digital, terutama di area yang kurang terlayani, agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi dan berpartisipasi secara online.
3. **Optimalisasi *E-Participation*:** Memperbaiki dan mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi BACCE untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Melakukan uji coba dan mendapatkan umpan balik dari pengguna secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah teknis.
4. **Kolaborasi Publik-Swasta yang Lebih Kuat:** Meningkatkan upaya untuk mengintegrasikan sektor swasta dalam program-program pemerintah, dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan minat mereka terhadap isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengadakan forum dan workshop untuk membahas potensi kolaborasi dan manfaatnya bagi kedua belah pihak.

5. **Sosialisasi yang Intensif dan Berkelanjutan:** Meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan dan mempromosikan aplikasi BACCE kepada masyarakat luas. Menggunakan berbagai media komunikasi untuk mencapai berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.
6. **Penguatan Kebijakan dan Regulasi:** Memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi publik-swasta. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan efektivitasnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. **Studi Komparatif:** Melakukan studi komparatif antara Kota Makassar dan kota-kota lain di Indonesia atau di negara lain yang telah menerapkan konsep *smart governance*. Membandingkan strategi, tantangan, dan keberhasilan yang telah dicapai untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas.
2. **Evaluasi Dampak Jangka Panjang:** Meneliti dampak jangka panjang dari penerapan aplikasi BACCE terhadap partisipasi publik, transparansi, dan kolaborasi publik-swasta. Mengukur perubahan dalam kualitas hidup masyarakat dan efektivitas program-program pemerintah yang berkaitan.
3. **Analisis Kualitatif dan Kuantitatif:** Menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi *smart governance*. Menggunakan survei,

wawancara mendalam, dan analisis data untuk mengukur persepsi masyarakat dan efektivitas program.

4. **Peran Inovasi Teknologi:** Meneliti peran inovasi teknologi lainnya dalam mendukung *smart governance*, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT). Mengevaluasi potensi dan tantangan dalam mengintegrasikan teknologi-teknologi ini dalam layanan publik.
5. **Partisipasi Kelompok Rentan:** Meneliti partisipasi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dalam program-program *smart governance*. Mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi dan merumuskan strategi untuk meningkatkan inklusi mereka.
6. **Studi Kasus Spesifik:** Melakukan studi kasus yang lebih mendalam terhadap program-program tertentu dalam aplikasi BACCE, seperti program pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak. Mengkaji implementasi, tantangan, dan hasil yang telah dicapai secara lebih detail.

Dengan saran dan arahan penelitian selanjutnya ini, diharapkan penelitian dan implementasi *smart governance* di Kota Makassar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminpu. *Smart City, definisi dan pengertian "SMART CITY : ALL WE NEED TO KNOW"*. Diakses dari <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/68/smart-city-definisi-dan-pengertian>
- Annisah, A. (2018). Usulan Perencanaan *Smart City: Smart governance* Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko*. Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 8(1), 59. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.103>
- ciptakarya.pu.go.id. (2022). *Konsep Smart City*. Diakses dari [https://pupr.ngawikab.go.id/konsep-smart-city/#:~:text=Konsep%20Kota%20Cerdas%20\(smart%20city\)%20pada%20Umumnya%20meliputi%3A,mengontrol%20dan%20mengintegrasikan%20semua%20infrastruktur.](https://pupr.ngawikab.go.id/konsep-smart-city/#:~:text=Konsep%20Kota%20Cerdas%20(smart%20city)%20pada%20Umumnya%20meliputi%3A,mengontrol%20dan%20mengintegrasikan%20semua%20infrastruktur.)
- H. Jordi K, M. Ghufran. (2022). *Pembangunan Inklusif*. Edisi 196. Diakses dari <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pembangunan-inklusif>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. In The SMERU Research Institute. www.smeru.or.id.
- Kusumandari, E. (2020). Arah Kebijakan Pengembangan *Smart governance* Di Kota Metro Dalam Urusan Pembangunan Dan Tata Ruang. Institut Teknologi Sumatera, 1–16.

http://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2101250004/22116105_20_16_1445.pdf

library.uir.ac.id. bab3. Diakses dari

<https://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/147120080/bab3.pdf>

Ma'mur, Y. D. P., Tahir, M. M., & Nurmaeta, S. (2017). *Smart governance* dalam Program Homecare Dottorotta di Kota Makassar. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(2), 143–156.

<http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/5734>

Malik, Asmiati. (2019). *Pembangunan inklusif yang melibatkan semua pihak adalah solusi lebih baik untuk Papua*. Diakses dari

<https://theconversation.com/pembangunan-inklusif-yang-libatkan-semua-pihak-adalah-solusi-lebih-baik-untuk-papua-122366>

Muhajir, R., Nasrulhaq, & Tahir, N. (2022). *Smart governance* Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 299–314.

Sodium,1Eko. (2023). *Smart governance*. Diakses dari

https://delameta.com/blog/Smart-governance/#Pengertian_Smart_Governance(Annisah, 2018)

UNDP (United Nations Development Programme). (n.d.). *Inclusive Growth*. Diambil dari <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities/targets/>

Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan *Smart City* dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi Dan Bisnis*, 4(2), 159–176.

Visvizi, A., & Lytras, M. (2018). Smart Cities: Issues and Challenges. *Cities*, Volume 81, Pages 1-5.

Visvizi, A., & Lytras, M. D. (2018). Smart cities: Issues and challenges. Elsevier.

Wahyuni, S., Alwi, & Indrayati Nur Indar, N. (2021). Strategi Implementasi *Smart governance* di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Program Rindu Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil). *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 376–397.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

Warsilah, H. (2015). Inclusive Development Approach for Reducing Social Exclusion in Urban Area: a Case Study of Marginal Groups in Kampung Semanggi, Solo, Central Java. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2), 207–232. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/283>

L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
 Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: 070/2763/SKP/SB/DPMPSTP/7/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 16591/S.01/PTSP/2024, Tanggal 27 Juni 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2756/SKP/SB/BKBP/VII/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : MUH. FACHRUL NUR FAISAL
 NIM / Jurusan : 105641109920 / Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
 Lokasi Penelitian : Terlampir,-
 Waktu Penelitian : 28 Juni 2024 - 28 Agustus 2024
 Tujuan : Skripsi
 Judul Penelitian : SMART GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF KOTA CERDAS DI KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 02 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

Lampiran Surat Keterangan Penelitian sdr(i) MUH. FACHRUL NUR FAISAL dengan nomor surat 070/2763/SKP/SB/DPMPSTP/7/2024

Lokasi Penelitian:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fisip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2387/FSP/A.5-VI/IX/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Muh Fachrul Nur Faisal

Stambuk : 105641109920

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Smart Governance Dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar"

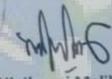
Pembimbing I : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Pembimbing II : Hamrun, S.IP., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 9 September 2023

D e k a n,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866972 Faks (0411) 3665580 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4514/05/C.4-VIII/VI/1445/2024

27 June 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 Dzulhijjah 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0608/FSP/A.6-VIII/VI/1445H/2024M tanggal 26 Juni 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. FACHRUL NUR FAISAL

No. Stambuk : 10564 1109920

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Smart Governance dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Juni 2024 s/d 28 Agustus 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Aiauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Fachrul Nur Fasial

Nim : 105641109920

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	3 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	8 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 01 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursuliansyah, Hum., M.I.P.
NBM. 264 591

SAB I Muh Fachrul Nur Fasial 105641109920

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	6%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	3%
---	--------------------------------------	----

Exclude quotes or Exclude matches
Exclude bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LULUS

turnitin



AB III Muh Fachrul Nur Fasial 105641109920

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unismuh.ac.id Internet Source	6%
---	--	----

Exclude quotes
Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LULUS
turnitin

AB IV Muh Fachrul Nur Fasial 105641109920

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
---	---	----

Exclude quotes Exclude bibliographies Exclude matches



AB V Muh Fachrul Nur Fasial 105641109920

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

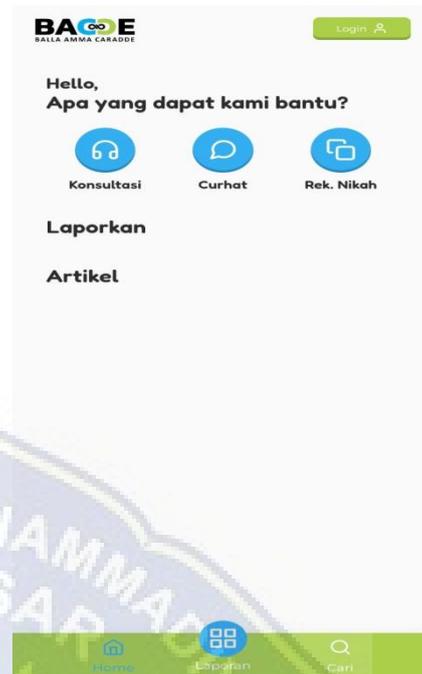
PRIMARY SOURCES

1	kbeonline.id Internet Source	2%
2	sesctv.net Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Aplikasi “BACCE” atau “Balla Amma Caradde”. Aplikasi untuk pelaporan/pengaduan dan konsultasi



Dokumentasi Kegiatan kolaborasi DP3A dengan public-swasta terkait kekerasan seksual



Wawancara dengan Kepada Ibu Nanin Sudiar Selaku selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kota Makassar.





Wawancara dengan Ibu Andi Srihani., SH selaku Staf UPTD PPA Kota Makassar



Wawancara dengan Bapak Reza Maulana, S.Kom., MT selaku Tenaga Ahli bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

RIWAYAT HIDUP



Muh. Fachrul Nur Faisal, lahir di Pangkajene 22 April 2002, anak pertama dari pasangan Muh Faisal Hm dan Harpina Faisal. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan tahun 2006 di sekolah TK Pembina Pangkajene dan tamat pada tahun 2007, dan pada tahun yang bersamaan tahun 2007 penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah dasar SD Negeri 28 Pangkajene Tumampua II pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pangkajene dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkajene dan pada saat kelas 2 pindah ke SMA Negeri 6 Makassar dan tamat pada tahun 2020, pada tahun yang sama penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan strata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan dapat Menyusun Skripsi ini dengan judul *Smart Governance* Dalam Pembangunan Inklusif Kota Cerdas di Kota Makassar.